



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
2022



Direktorat Jenderal Perkebunan



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian
2022



Direktorat Jenderal Perkebunan



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perkebunan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 10 Februari 2023

Inspektur III



Andry Asmara, S.E., M.M.
NIP.197312141994031001



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian dan PERMENPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Ditjen Perkebunan berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dirjen Perkebunan Tahun 2022 adalah 1) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian dengan Indikator Kinerja yaitu: 1-1 Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan dengan target 81,00% ; 1-2 Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan dengan target 45,00%; 1-3 Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI dengan target sebesar 40,00%, 2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian dengan Indikator Kinerja; 2-1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan dengan Target 1,85%, 3) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja; 3-1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan dengan target 32.72 Nilai 4) Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan indikator kinerja 4-1 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan dengan target 85.00 nilai, Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.013.577.727.789 dari pagu Rp.1.044.527.448.000 atau mencapai 97,04% dari pagu DIPA dengan capaian fisik sebesar 99,70%.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pembangunan perkebunan. Hal ini bertujuan agar kegiatan pembangunan perkebunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan berdasarkan analisis dan evaluasi yang objektif. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 ini sangat ditentukan oleh dukungan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Semoga dokumen ini menjadi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang memadai.

Jakarta, Februari 2023
Direktur Jenderal Perkebunan



Anni Nur Alam Syah, STP., MT
NIP.19750201200212100

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Organisasi	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi	12
1.3.1 Potensi Pembangunan Perkebunan	12
1.3.2 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global	16
1.3.3 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional....	17
1.4 Aspek Sumber Daya Manusia	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024	23
2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024	24
2.1.2 Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan	28
2.1.3 Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024	29
2.1.4 Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024	30
2.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022	34
2.2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022	34
2.3 Perjanjian Kinerja.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.....	43
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	66
3.3 Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan.....	70
BAB IV PENUTUP.....	77
LAMPIRAN.....	79

Daftar Tabel

Tabel 1.	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 2.	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 3.	Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024.....	29
Tabel 4.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022	34
Tabel 5.	Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2022	35
Tabel 6.	Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Tahun 2022.....	35
Tabel 7.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022	36
Tabel 8.	Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2022	36
Tabel 9.	Kegiatan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2022	37
Tabel 10.	Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2022.....	37
Tabel 11.	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022.....	38
Tabel 12.	Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2022 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	44
Tabel 13.	Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian 2022.....	46
Tabel 14.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2022	47
Tabel 15.	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2022	48
Tabel 16.	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	50
Tabel 17.	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.....	53
Tabel 18.	Target dan Capaian Sasaran Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan Tahun 2022.....	55

Tabel 19. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2022	56
Tabel 20. Capaian Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien.....	59
Tabel 21. Unsur Penilaian PMPRB.....	60
Tabel 22. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan 2022.....	60
Tabel 23. Capaian Sasaran Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas 2022	63
Tabel 24. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan 2022.....	64
Tabel 25. Realisasi Anggaran per unit eselon II TA 2022	71

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan 2022 6

Gambar 2. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional..... 25

Gambar 3. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART 2022..... 64



BAB I

Pendahuluan

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Pada tahun 2020-2024, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan

kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bio energi yang bersifat terbarukan; berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan

penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan. Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. Implikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah akan membuka

peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur penting dalam SAKIP yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan Kinerja; 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja; 4) Bab IV Penutup dan Lampiran. Di dalam Bab III juga membahas 1) capaian terhadap target tahun berjalan; 2) capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3) capaian kinerja terhadap Renstra dan PK; 4) membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab kegagalan; analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya; serta 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

1.2 Organisasi

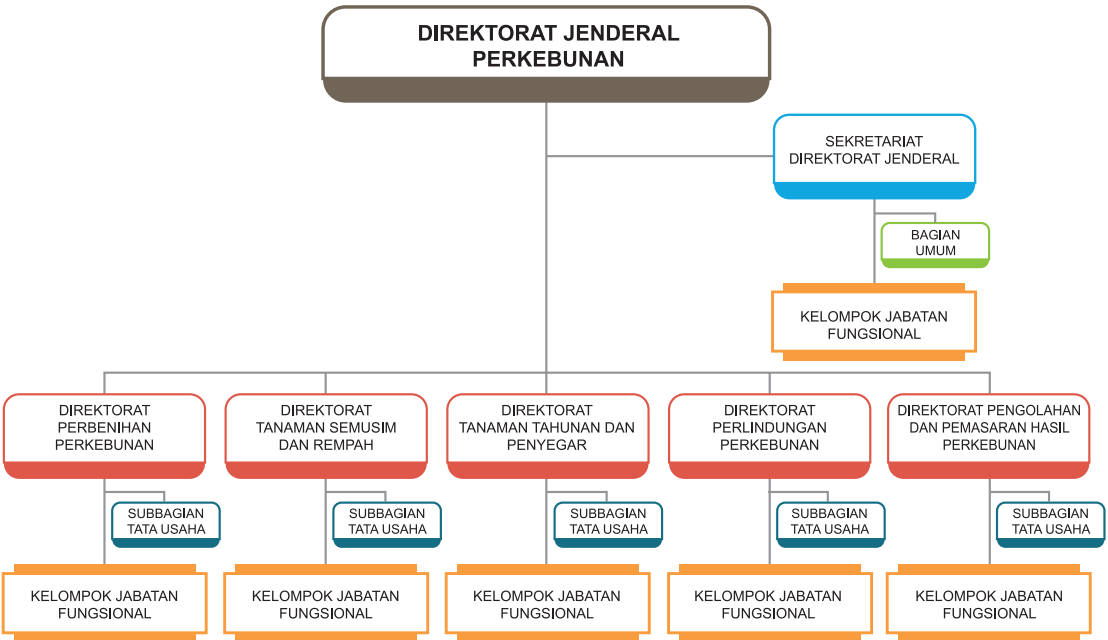
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian terkait nomenklatur organisasi. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran

hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;

- 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perbenihan, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan tertera pada Gambar 1 :



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan**, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

Direktorat Jenderal Perkebunan, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan BMN
- c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,

pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik

- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

2. Direktorat Perbenihan Perkebunan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

3. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman

tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain

- c. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain
- d. Pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala, dan cengkeh serta rempah dan semusim lain
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

4. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar
- d. Pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

5. Direktorat Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman

semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

- d. Pelaksanan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
- h. Pelaksanaan urusan tata

usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha serta pemasaran hasil perkebunan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta

pemasaran hasil perkebunan.

- f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

7. Direktorat Jenderal Perkebunan

memiliki 4 UPT Pusat yang berada di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/ atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas:

- a. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya; yang selanjutnya disebut BBPPTP Surabaya merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan
- b. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan; yang selanjutnya disebut BBPPTP Medan merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

- c. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon; dan yang selanjutnya disebut BBPPTP Ambon merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- d. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak yang selanjutnya disebut BPTP Pontianak merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. BPTP Pontianak secara teknis dibina oleh Direktur Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan.

Tugas pokok BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perbanyak benih;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, pengujian adaptasi (observasi), penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih;
- c. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan;
- d. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
- e. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik;
- f. Pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik;
- g. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik

surveillance, teknik pengendalian OPT perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil;

- h. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
- i. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim;
- j. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati;
- k. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
- l. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- m. Pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- n. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- o. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
- p. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan BPTP Pontianak dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
- b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
- c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
- d. Pelaksanaan pengembangan teknologi, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
- f. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
- g. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
- i. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
- j. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium; dan
- k. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga Balai.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Secara umum isu strategis sub sektor yang saat ini masih berlangsung, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang mencapai lebih dari 90%. Namun demikian, secara umum produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, misalnya produktivitas kopi yang hanya 0,78 ton/ha, kakao 0,80 ton/ha, karet 1,2 ton/ha, kelapa sawit 3,1 ton/ha. Hal ini terjadi karena beberapa sebab antara lain kondisi tanaman yang sudah tua, penggunaan benih asalan, penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) yang belum optimal.

Bersamaan dengan itu, luas areal kebun rakyat yang perlu diremajakan/direhabilitasi karena tanamannya sudah tua dan/atau rusak sangat luas, yaitu mencapai 1,742 Juta ha atau 11,2% dari luas perkebunan rakyat strategis nasional (Renstra Ditjenbun, 2020-2024). Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan

prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain, modal finansial, serta peningkatan SDM petani (jumlah dan kapabilitas).

Mencermati isu-isu strategis di atas, Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai representasi pemerintah menaruh perhatian penuh (*concern*) terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan selalu berupaya memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui program-program pembangunan perkebunan yang berorientasi pada peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan secara berkelanjutan. Aspek strategis organisasi ini didukung oleh adanya potensi pembangunan perkebunan yang ada, di tengah tantangan yang dihadapi. Eksistensi organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan sangat strategis dalam mengoptimalkan dan memberdayakan potensi perkebunan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tantangan yang dihadapi melalui kebijakan dan program pembangunan perkebunan.

1.3.1 Potensi Pembangunan Perkebunan

Pembangunan perkebunan ke depan akan tetap berfungsi sebagai salah satu pilar ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang signifikan

bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu pilar ekonomi, perkebunan ditopang oleh beberapa potensi antara lain:

1. Keanekaragaman hayati melimpah sebagai negara tropis.

Sebagai negara tropis maka Indonesia secara alami merupakan kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi bio-massa dan *feedstock bio-industry*. Kondisi ini juga dapat menjadi basis keunggulan kompetitif dalam bioeconomic;

2. Pengembangan *bio-economic*.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan *bio-economic*. *Bio-economic* mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan *bio-economic* dipacu oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk *functional food*;

3. Peningkatan permintaan dunia terhadap 4F Crops (*Food, Feed, Fiber and Fuel*). Komoditas perkebunan di Indonesia memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan manusia (*food*), sumber pakan ternak (*feed*), kebutuhan

serat pangan (*fiber*) untuk pupuk organik dan bahan bakar biomassa dan kebutuhan minyak nabati (*fuel*) untuk kebutuhan bahan bakar nabati (BBN). Peluang ini perlu dimanfaatkan karena semakin tingginya permintaan dunia akan produk 4F Crops yang ramah lingkungan sebagai implikasi dari menipisnya cadangan fosil di dunia.

4. Kecenderungan baru penghargaan atas jasa lingkungan dan jasa *amenity*.

Lahan perkebunan tidak hanya penghasil bahan makanan, serat dan energi tetapi juga mempunyai multifungsi yang menghasilkan jasa lingkungan dan jasa *amenity*. Jasa lingkungan dan jasa *amenity* lahan perkebunan antara lain penyedia sumber air tanah dan oksigen, pengendali banjir, pencegah erosi/longsor dan sedimentasi, mempertahankan suhu udara, mendaur ulang limbah, menjaga kualitas udara/ purifikasi, pengatur tata air dan menjaga keberadaan sumber daya air, memitigasi perubahan iklim, sumber keindahan dan kenyamanan, pelestari keanekaragaman hayati, pelestari budaya pedesaan, dan sebagainya.

5. Perkembangan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi pertanian/perkebunan.

Perkembangan diseminasi teknologi kepada petani/pekebun lebih mudah dilakukan karena umumnya petani/pekebun tertarik kepada hal-hal yang bersifat inovatif, namun tingkat adopsi masih

sangat rendah. Hal ini disebabkan karena produk yang dihasilkan dengan mengadopsi teknologi baru tidak mendapatkan insentif atau nilai tambah artinya harga yang diterima tidak berbeda jauh dengan harga produk tanpa teknologi baru.

6. Ketersediaan sumber daya lahan dan kesesuaian agroekosistem. Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Total luas daratan Indonesia sebesar 192 juta hektar, terbagi atas 123 juta hektar (64,6%) kawasan budidaya dan 67 juta hektar sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya di daratan yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta hektar, meliputi lahan basah 25,6 juta hektar; lahan kering tanaman semusim 25,3 juta hektar dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Sampai saat ini dari areal yang berpotensi untuk pertanian, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta hektar sehingga masih tersisa 54 juta hektar yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

7. Distribusi dan aksesibilitas pemanfaatan sumber daya air. Ketersediaan sumber daya air nasional (*annual water resources/AWR*) masih sangat besar, terutama di wilayah barat, akan tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebaliknya di sebagian besar wilayah timur yang radiasinya melimpah dan curah hujan rendah (<1.500 mm per tahun) hanya

terdistribusi selama 3-4 bulan. Total pasokan atau ketersediaan air wilayah (air permukaan dan air bumi) di seluruh Indonesia adalah 2.110 mm per tahun setara dengan 127.775 m³ per detik. Indonesia dikategorikan sebagai negara kelompok 3 berdasarkan kebutuhan dan potensi sumber daya airnya yang membutuhkan pengembangan sumberdaya 25-100% dibanding kondisi saat ini.

8. Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI). SDI ini dapat menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan pengembangan rantai nilai. Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran Internasional diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/skills; 2) keberadaan usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan pendidikan; 6) migrasi tenaga kerja ke sektor lain; 7) ketimpangan pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

9. Bonus Demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi” yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur

penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non usia kerja kepada penduduk usia kerja. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja di Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

10. Perkembangan struktur, perilaku dan

kinerja pasar. Perdagangan komoditas perkebunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, terutama didorong oleh peningkatan rasio pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah penduduk, adanya dukungan regulasi dan akses pasar yang semakin terbuka. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian/ perkebunan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian/ perkebunan Indonesia.

11. Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan.

Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk pengembangan sistem politik

perkebunan yang digerakkan oleh/ dan berorientasi pada pekebun/ petani kecil. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2000, peran pemerintah saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan pertanian/ perkebunan.

Pembangunan pertanian/ perkebunan pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di setiap daerah.

12. Partisipasi masyarakat pekebun.

Paradigma pembangunan pada era otonomi daerah memposisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang secara dinamik dan kreatif didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan sehingga terjadi perimbangan kekuasaan (*power sharing*) antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mengendalikan hak pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang cenderung berpihak kepada pengusaha dengan anggapan bahwa kelompok pengusaha memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

13. Dinamika tata kelola dan reformasi birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi secara nasional telah tercantum dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang menyebutkan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Beberapa isu dan agenda yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi, (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan, (4) anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang partisipatif, serta (5) hubungan baru yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Adanya potensi pembangunan perkebunan tersebut merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mengoptimalkan pembangunan perkebunan, maka pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kawasan. Pengembangan kawasan perkebunan sesuai dengan Permentan 18/2018 tentang kawasan pertanian berbasis korporasi, kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis maupun lokasi baru yang sesuai tipologi agroekosistem dan persyaratan budidaya bagi masing-masing jenis komoditas perkebunan. Kriteria khusus kawasan perkebunan mencakup berbagai aspek

teknis yang bersifat spesifik komoditas, baik untuk tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah. Kriteria khusus kawasan perkebunan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengusaha perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha. Perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi
- 2) Pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerjasama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerjasama pengolahan hasil dan/atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya
- 3) Arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit, dengan penerapan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

1.3.2 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Global

Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam ruang lingkup global yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global yang dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20

dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya)

2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015)
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas)
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT)
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan)
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku)
7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

1.3.3 Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Lingkup Nasional

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SDI) pertanian/

perkebunan)

2. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lain atau dari satu komoditi menjadi komoditi lain
3. Pembangunan pertanian difokuskan pada pengembangan kawasan dengan korporasi petani. Dalam pengembangan kawasan dan korporasi akan dihadapkan pada pengoptimalan berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik
4. Adanya anomali iklim yang patut diantisipasi dalam upaya pelaksanaan pembangunan perkebunan
5. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan) yang belum optimal
6. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/alih fungsi lahan (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan)
7. Peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan
8. Kondisi tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah
9. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
10. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan
11. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).

1.4 Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah sebanyak 801 orang yang tersebar pada 6 unit kerja eselon II di

Kantor Pusat dan 4 Unit Pelaksana Teknis (3 BBPPTP dan 1 BPTP). Data pegawai didasarkan pada Golongan Kepangkatan, dan didasarkan pada Pendidikan beserta persebarannya dengan rincian pada Tabel 1:

Tabel 1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO.	UNIT KERJA	BERDASARKAN GOLONGAN				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	JUMLAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	0	0	1	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	21	94	17	132
3	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	0	1	34	16	51
4	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	0	1	38	12	51
5	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	0	3	33	14	50
6	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	0	2	40	9	51
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	0	3	37	13	53
8	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	1	10	122	15	148
9	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	0	5	90	22	117
10	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	0	27	57	3	87
11	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	0	17	40	3	60
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		1	90	585	125	801

Sumber : Sekretariat Ditjenbun, 2022

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Ditjen Perkebunan merupakan golongan III sebanyak 596 orang atau 73,03%, disusul golongan IV

sebanyak 125 orang atau 15,60%. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	UNIT KERJA	DISTRIBUSI BERDASARKAN PENDIDIKAN												JENIS KELAMIN		
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	0	32	70	0	0	13	0	0	13	2	2	132	62	70	132
3	DIREKTORAT PERBENIHAN PERKEBUNAN	1	24	23	0	0	1	0	0	2	0	0	51	21	30	51
4	DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	0	15	32	1	0	1	0	0	2	0	0	51	25	26	51
5	DIREKTORAT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	1	17	26	0	0	2	0	0	3	1	0	50	27	23	50
6	DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	0	17	26	0	0	3	0	0	5	0	0	51	24	27	51
7	DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	1	23	22	0	0	4	0	0	3	0	0	53	22	31	53
8	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN	0	28	84	9	0	3	0	1	22	1	0	148	63	85	148
9	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA	1	37	63	0	0	9	0	0	6	1	0	117	53	64	117
10	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN AMBON	0	4	31	7	0	10	0	1	34	0	0	87	47	40	87
11	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	0	2	34	2	0	13	0	0	9	0	0	60	37	23	60
TOTAL PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN		4	200	411	19	0	59	0	2	99	5	2	801	382	419	801

Sumber : Sekretariat Ditjenbun, 2022

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan ialah lulusan Sarjana (S1) dengan jumlah 411 orang atau 51,31%, disusul lulusan S2 sebanyak 200 orang (24,96%), dan SLTA sebanyak 99 orang (12,35%).



BAB II Perencanaan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

RPJMN tahun 2020-2024 mengusung tema pembangunan **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Tema pembangunan tersebut sekaligus menjadi Visi Presiden dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tema pembangunan ini dilaksanakan melalui 7 agenda pembangunan yang merupakan Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Ketujuh PN tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu “Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”, dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) dan PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Perkebunan secara konkrit memberikan kontribusi pada Program Prioritas, “Nilai tambah dan daya saing industri.” Program Prioritas (PP) 3, “Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan” dan Program Prioritas (PP) 6, “Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi”. Sasaran Program Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri antara lain meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan dan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan. Peningkatan kegiatan untuk padat karya dilakukan dengan fasilitasi kegiatan berupa pemberian upah (HOK) pada nursery pada kegiatan penguatan perbenihan perkebunan.

2.1.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Indonesia berpendapatan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”**. Dari visi tersebut, diturunkan beberapa Program Nasional (PN) yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional periode 2020-2024. Kementerian Pertanian berkontribusi pada Program Nasional (PN) 1, yaitu “Penguatan Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”, dengan 2 (dua) Program Prioritas, yaitu: PP 3 (Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan) dan PP 6 (Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi). Kementerian Pertanian juga telah menentukan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi, yaitu: 1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian; serta 5) Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 ialah **“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam**

memperkuat struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”.

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri. Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Berlandaskan pada hal tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal, yaitu: 1) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman; 2) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan; 3) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan; 4) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI; 5) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; serta 6) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Keenam

berjalannya rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kedua hal tersebut menjadi

faktor pendukung. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perkebunan 2020-2024 digambarkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kerangka Strategis Pembangunan Perkebunan Nasional

Dari Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya

saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan. **Pilar kedua** adalah budidaya tanaman perkebunan. Efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui

penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). **Pilar ketiga** adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. **Pilar keempat** adalah jaminan mutu. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Dalam mendukung pilar pembangunan perkebunan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan beberapa kegiatan prioritas antara lain:

1. Kegiatan 1: Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman. Dalam rangka mewujudkan produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional, perlu dilakukan pengelolaan benih tanaman perkebunan yang

berkualitas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas benih yang memadai. Kualitas benih yang baik akan mempengaruhi produktivitas tanaman perkebunan, yang pada akhirnya meningkatkan produksi tanaman perkebunan. Selain itu, pengelolaan benih juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan tanaman perkebunan.

2. Kegiatan 2: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman semusim dan rempah. Terdapat beberapa komoditas tanaman semusim dan rempah yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman tebu, tembakau, dan kapas untuk pengendali impor, serta tanaman lada, pala, nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh, gambir, dan vanili untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

3. Kegiatan 3: Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan. Dari aspek budidaya tanaman perkebunan, efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman tahunan dan penyegar. Terdapat beberapa komoditas tanaman tahunan dan penyegar yang menjadi fokus Ditjen Perkebunan untuk tahun 2020-2024, yaitu: tanaman kemiri sunan dan sagu untuk pengendali impor, serta tanaman kopi, kelapa sawit, karet, jambu mete, kakao, kelapa, teh, dan aren untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

4. Kegiatan 4: Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI

tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah kejadian serangan OPT dan DPI yang tidak melebihi 2% dari total luas areal tanaman Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).

5. Kegiatan 5: Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan. Kegiatan peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan merupakan hal penting yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional sesuai amanat RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

6. Kegiatan 6: Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi

Kementerian Pertanian. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan secara selaras dengan roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Berdasarkan roadmap Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi: area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan perundang-undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik. Kegiatan “Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian” merupakan kontribusi Ditjen Perkebunan dalam mendukung upaya Kementerian Pertanian Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, yang dilaksanakan melalui strategi:

- a) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; serta
- c) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

2.1.2 Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan. Lebih detail mengenai target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki 4 (empat) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap tahun pengukuran.

Tabel 3. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 - 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80.50	81.00	81.50	82
		Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	80	45	45	45	45
		Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1.8	1.82	1.85	2.00	2.10
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32.58	32.62	32.72	32.75	32.91
	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	85	85	85	85

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 Revisi II

2.1.3 Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

Berlandaskan pada hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan 6 (enam) kegiatan di tingkat Direktorat Jenderal, yaitu:

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; serta
6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Keenam kegiatan yang ada pada rencana strategis ini, sangat erat kaitannya dengan

regulasi dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan saat ini yang dijabarkan melalui kegiatan dan anggaran oleh Ditjen Perkebunan setiap tahunnya.

2.1.4 Kaitan Kegiatan dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah

Prioritas pengembangan tanaman semusim dan rempah difokuskan pada 7 komoditas unggulan perkebunan yaitu Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Kapas, Tembakau dan Nilam. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat, tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah adalah terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2020-2024 adalah:

a. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan

diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/pengolahan/pascapanen.

- b. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran kerjasama teknis, administrasi keuangan, asset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasi teknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
- c. Meningkatkan fasilitasi penerapan pembinaan usaha tanaman semusim dan rempah berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan tanaman semusim dan rempah pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/potensi berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis tanaman semusim dan rempah melalui sistem budidaya yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan

isu-isu lingkungan terutama penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).

- f. Meningkatnya pengembangan komoditas tanaman semusim dan rempah sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman semusim dan rempah dalam mendukung pengembangan sistem pertanian *bio-industry* melalui pendekatan *zero waste management*.
- g. Meningkatnya fasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan tanaman semusim dan rempah yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas

2. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar lebih diprioritaskan untuk peningkatan produksi melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan dan pemberian pelayanan yang berkualitas. Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/pengawasan/pendampingan,

regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayah masing-masing terhadap pengembangan 9 (sembilan) komoditas unggulan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu Kelapa, Kelapa, Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Teh, Sagu dan Jambu Mete.

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam rangka melaksanakan pembangunan perkebunan tahun 2022 mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 294.040.993.000 dana tersebut untuk melaksanakan kegiatan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar di pusat dan di daerah yang meliputi: (1). Meningkatnya produksi tanaman ekspor dari tanaman tahunan dan penyegar; (2) Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

3. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Perbenihan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024 yaitu:

a. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan

- 1) Kebijakan penyediaan benih unggul bermutu tanaman perkebunan, untuk mendukung pembangunan perkebunan berupa: pembangunan kebun induk (KI), pembangunan kebun entres, pemeliharaan kebun induk (KI), pemeliharaan kebun entres dan pemeliharaan kebun benih datar (KBD).
- 2) Kebijakan penerapan budidaya yang baik/*Good Agricultural Practices*.
- 3) Kebijakan pemeliharaan kebun sumber benih (BPT, PIT dan kebun entres) yang telah ditetapkan.
- 4) Kebijakan pemeliharaan kebun sumber benih unggul yang telah ditetapkan.
- 5) Kebijakan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan (BPT, PIT dan kebun entres).
- 6) Kebijakan penetapan kebun sumber benih varietas yang telah dilepas.
- 7) Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan yang telah ditetapkan.

b. Fasilitas Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan

Sasaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2022 yang ditetapkan dan didukung oleh anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK dan selanjutnya menjadi

Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan dengan total anggaran sebesar Rp.120.851.915.000 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah benih kelapa sawit yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 (Tidak ada kegiatan APBN di Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk komoditi kelapa sawit)
- b) Jumlah benih kakao yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 687.702.000,-
- c) Jumlah benih kopi yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 750.168.000,-
- d) Jumlah benih kelapa yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.476.488.000,-
- e) Jumlah benih karet yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 239.370.000,-
- f) Jumlah benih jambu mete yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.171.000,-
- g) Jumlah benih aren yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.225.000,-
- h) Jumlah benih teh yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 (Tidak ada kegiatan APBN di Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk komoditi teh)
- i) Jumlah benih sagu yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.370.000,-
- j) Jumlah benih tebu yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.249.390.000,-

- k) Jumlah benih lada yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.283.000,-
- l) Jumlah benih pala yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.107.172.000,-
- m) Jumlah benih cengkeh yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 522.699.000,-
- n) Jumlah benih tembakau yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0 (Tidak ada kegiatan APBN di Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk komoditi tembakau)
- o) Jumlah benih vanili yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.250.000,-
- p) Jumlah benih nilam yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0 (Tidak ada kegiatan APBN di Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk komoditi nilam)
- q) Jumlah benih serih wangi yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0 (Tidak ada kegiatan APBN di Direktorat Perbenihan Perkebunan untuk komoditi serihwangi)
- r) Jumlah benih kayu manis yang dihasilkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.880.000,-
- s) Jumlah layanan publik kelembagaan benih perkebunan yang diberikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.584.137.000,-
- t) Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan

Direktorat Perbenihan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan indikator kinerja tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbenihan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.636.212.000,-

4. Penguatan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan antara lain:

- a. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan
- b. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Tanaman Tahunan yang efektif, efisien dan akuntabel

5. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sasaran kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor dan tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen dengan indikator kinerja tahun 2020-2024 (edisi revisi) adalah:

- a. Nilai ekspor produk perkebunan
- b. Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan yang sesuai peruntukan Pembinaan usaha perkebunan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sesuai tugas dan fungsi berdasarkan perubahan organisasi Kementerian Pertanian sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta adanya restrukturisasi program K/L melalui penyempurnaan *output/ outcome* yang lebih terukur dalam kerangka arsitektur anggaran berbasis kinerja dan pendekatan konsep Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan.

2.2 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 mengambil tema **“Pemulihan**

Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 bertujuan untuk mendorong pemulihan dampak Covid-19 ditingkat pekebun yang diwujudkan dengan kegiatan yang fokus.

2.2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

Sasaran kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 adalah meningkatnya daya saing komoditas perkebunan, meningkatnya nilai tambah komoditas perkebunan, terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, terwujudnya anggaran kementerian pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Pagu alokasi anggaran per kegiatan Ditjen Perkebunan tertuang pada Tabel 4.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
018.05	Ditjen. Perkebunan	1,044,527,448,000
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	803,179,325,000
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	294,040,993,000
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82,251,062,000
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	94,202,383,000
5889	Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	211,832,972,000
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan	120,851,915,000
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	241,348,123,000
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	241,348,123,000

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Program nilai tambah dan daya saing industri didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 803.179.325.000,- dan program dukungan manajemen didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp.241.348.123.000,- sedangkan untuk rincian kegiatan Ditjen Pekebunan dan

dukungan anggaran Tahun 2022 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kegiatan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 294.040.993.000,- dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran	Target Volume	Satuan
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.251.062.000		
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	694.316.000		
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	694.316.000	14	Rek. Teknologi
1779.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	5.701.974.000		
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974.000	7	NSPK
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.562.340.000		
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	5.221.060.000	61	Unit
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	1.341.280.000	15	Pkt Teknologi
1779.PDC	Sertifikasi Produk	5.580.459.000		
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	5.580.459.000	48	Desa
1779.QDD	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	200.000.000		
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	200.000.000	3	Kasus
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	63.511.973.000		
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	13.448.279.000	701	Ha
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (PEN)	50.063.694.000	11.631	Ha

Sumber : Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2022

2. **Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan** dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 82.251.062.000,- dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6. Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran	Target Volume	Satuan
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.251.062.000		
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	694.316.000		
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	694.316.000	14	Rek. Teknologi
1779.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	5.701.974.000		
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974.000	7	NSPK
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.562.340.000		
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	5.221.060.000	61	Unit
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	1.341.280.000	15	Pkt Teknologi
1779.PDC	Sertifikasi Produk	5.580.459.000		
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	5.580.459.000	48	Desa
1779.QDD	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	200.000.000		
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	200.000.000	3	Kasus
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	63.511.973.000		
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	13.448.279.000	701	Ha
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (PEN)	50.063.694.000	11.631	Ha

Sumber : Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2022

3. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.348.123.000,-

dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran	Target Volume	Satuan
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	241.348.123.000		
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	132.613.111.000		
1780.EBA.956	Layanan BMN	5.926.600.000	5	Layanan
1780.EBA.957	Layanan Hukum	4.660.000.000	2	Layanan
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.964.893.000	1	Layanan
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	550.676.000	1	Layanan
1780.EBA.962	Layanan Umum	27.844.507.000	5	Layanan
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5.656.054.000	1	Layanan
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	82.010.381.000	5	Layanan
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.642.849.000		
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	6.385.609.000	5	Unit
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.257.240.000	2	Unit
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.967.935.000		
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4.967.935.000	850	Orang
1789.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	95.124.228.000		
1789.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.473.311.000	81	Dokumen
1789.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.594.230.000	5	Dokumen
1789.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	8.312.287.000	5	Dokumen
1789.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	744.400.000	1	Layanan

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

4. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 94.202.383.000,-. dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 8. Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Anggaran	Target Volume	Satuan
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	94.202.383.000		
5888.AEA	Koordinasi	6.063.350.000		
5888.AEA.001	Koordinasi Bimtek Movev dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	6.063.350.000	61	Kegiatan
5888.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	6.433.228.000		
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6.433.228.000	6	NSPK
5888.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	11.433.425.000		
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	11.433.425.000	571	Ha
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	70.272.380.000		
5888.RAI.001	Kawasan Lada	9.115.790.000	800	Ha
5888.RAI.002	Kawasan Pala	15.427.364.000	5.600	Ha
5888.RAI.003	Kawasan Cengkeh	2.106.361.000	1.070	Ha
5888.RAI.004	Kawasan Tebu (PEN)	34.163.167.000	4.800	Ha
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	9.459.698.000	76	Ha

Sumber : Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2022

5. Kegiatan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 164.589.152.000,- dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Kegiatan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu	Target Volume	Satuan
		Anggaran		
5889	Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	211.832.972.000		
5889.ADA	Standarisasi Produk	1.996.200.000		
5889.ADA.001	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	1.996.200.000	671	Surat
5889.AEA	Koordinasi	10.974.513.000		
5889.AEA.001	Koordinasi Bimtek Money dan Pelaporan Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	10.974.513.000	112	Kegiatan
5889.AEH	Promosi	1.763.916.000		
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	1.763.916.000	15	Promosi
5889.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	12.520.222.000		
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	12.520.222.000	8	NSPK
5889.PDA	Standarisasi Produk	14.000.000.000		
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat (PEN)	14.000.000.000	20.000	STDB
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	125.049.852.000		
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN)	10.781.881.000	99	Unit
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	114.267.971.000	227	Unit
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.528.269.000		
5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN)	17.411.993.000	74	Unit
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	28.116.276.000	87	Unit

Sumber : Direktorat PPHBun, 2022

6. Kegiatan Penguatan Perbenihan Perkebunan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 120.851.915.000,- dengan *output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 10. Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu	Target Volume	Satuan
		Anggaran		
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan	120.851.915.000		
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.638.638.000		
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	4.638.638.000	145	Rek Kebijakan
5890.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	8.102.081.000		
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	8.102.081.000	6	NSPK
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	4.629.364.000		
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	2.905.177.000	61.659.600	Batang
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	1.724.187.000	12.589.740	Batang
5890.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	21.685.126.000		
5890.RAI.001	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	21.685.126.000	1.375	Ha
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	81.796.706.000		
5890.RBK.001	Nursery (PEN)	34.396.706.000	20	Unit
5890.RBK.003	Nursery Modern – SBSN	47.400.000.000	1	Unit

Sumber : Direktorat Perbenihan, 2022

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target sasaran kinerja serta indikator kinerja kegiatan

yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (*outcome*) maupun keluaran (*output*).

Perjanjian Kinerja (PK) awal Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 mengalami beberapakali revisi seiring dinamika perubahan DIPA dan pergantian pejabat pada tahun 2022. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai penjabaran dari

Rencana strategis Direktorat Jenderal Perkebunan setiap tahunnya yang telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai dukungan terhadap pencapaian kinerja pada PK, pada Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK yang dikeluarkan pada bulan November 2021 dengan total anggaran sebesar Rp.1.177.410.034.000,-.

Selanjutnya pada bulan April 2022 melalui DIPA *refocusing* anggaran menjadi Rp.1.179.410.034.000,-. Perubahan anggaran terjadi kembali realokasi DIPA pada Juni 2022 menjadi Rp.1.169.410.034.000 dan pada Bulan Agustus 2022 kembali terjadi revisi DIPA anggaran menjadi Rp. 1.167.819.150.000,- dan pada Bulan

Oktober 2022 kembali terjadi perubahan anggaran DIPA Realokasi Gaji menjadi Rp.1.163.505.189.000, dan terakhir Perubahan DIPA Buka Blokir pagu anggaran menjadi Rp.1.044.527.448.000.

Anggaran tersebut dipergunakan oleh 79 satker lingkup Ditjen Perkebunan terdiri 1 satker Kantor Pusat Ditjen Perkebunan, 4 Satker UPT Pusat (Kantor Daerah) Ditjen Perkebunan, 66 Satker (DK dan TP) Provinsi yang menangani perkebunan dan 8 Satker Kabupaten (TP) yang menangani perkebunan di seluruh Indonesia.

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSP) serta target yang telah disusun dalam format **Perjanjian Kinerja (PK)** Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 11. berikut.

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

A Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan	1-1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	81,00 (indeks)
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45%
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40%
2	Meningkatnya Daya saing Komoditas Perkebunan	2-1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	1,85%
B Dukungan Penguatan dan Dukungan Transformatif Lainnya				
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32,72 (Nilai)
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85,00 (Nilai)

Sumber : Ditjen Perkebunan, 2022

PK Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 yang terakhir (Desember 2022) di turunkan langsung pada PK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan. Sementara itu PK Direktorat lainnya antara lain Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, serta Direktorat Perbenihan ialah mendukung Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan melalui peningkatan produksi komoditi perkebunan berorientasi ekspor yang terdiri dari karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, teh, lada, tembakau, kakao, cengkeh, pala, kayu manis, kacang mete, sagu, gambir.

Berdasarkan pada Tabel 11 dapat diuraikan bahwa:

1. Target Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan dengan indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan sebesar 81,00%
2. Target Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan dengan indikator kinerja Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan sebesar 45,00%
3. Target Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan dengan indikator kinerja Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI sebesar 40,00%
4. Target Meningkatnya Daya saing Komoditas Perkebunan dengan indikator kinerja Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan sebesar 1,85%
5. Target Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan indikator kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 32,72
6. Target Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku. Untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022, digunakan metode *scoring* terhadap sasaran yang telah ditetapkan, dengan mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat berhasil (capaian >100%),
2. Berhasil (capaian 80-100%),
3. Cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan
4. Kurang berhasil (capaian <60%).

Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2022 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perkebunan tahun 2022. Program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2022 yang

dilaksanakan merupakan turunan dari program Kementerian Pertanian yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian yang terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
4. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Program Dukungan Manajemen

Dari 5 program Kementerian Pertanian Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan kontribusi pada pencapaian program :

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
2. Program Dukungan Manajemen Sasaran Program yang diturunkan Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari :
 - a. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian
 - b. Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian
 - c. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima

d. Terwujudnya Anggaran
Kementerian Pertanian yang
Akuntabel dan Berkualitas

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang mendukung PK Kementerian Pertanian adalah tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan yang mendukung sasaran meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian dan pertumbuhan nilai ekspor perkebunan yang mendukung sasaran meningkatnya daya saing komoditas pertanian.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan

dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja antara Dirjen Perkebunan dengan Menteri Pertanian dapat dilihat pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Ditjen Perkebunan Tahun 2022 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

A Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri								Kriteria Keberhasilan
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Perkebunan	1-1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	81,00	93,12	114,96%	Sangat Berhasil
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	45,00	58,09	129,09%	Sangat Berhasil
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40,00	40,06	100,15%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Daya saing Komoditas Perkebunan	2-1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1,85	2,57	138,92%	Sangat Berhasil
B Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya								Kriteria Keberhasilan
No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,72 (Nilai)	35,00	106,97%	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85,00 (Nilai)	91,04	107,11%	Sangat Berhasil

Sumber: Ditjen Perkebunan 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Ditjen Perkebunan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri:

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian dengan Indikator Kinerja Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan terealisasi sebesar 93,12% dari target 81,00% atau (114,96%) dan masuk kategori **sangat berhasil**.
2. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian dengan Indikator Kinerja Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan terealisasi sebesar 58,09% dari target 45% atau (99,91%) dan masuk kategori **sangat berhasil**.
3. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian dengan Indikator Kinerja Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI terealisasi sebesar 40,06% dari target 40% atau (100,15%) dan masuk kategori **sangat berhasil**.
4. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian dengan Indikator Kinerja Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan terealisasi sebesar 2,57% dari target 1,85% atau (138,92%) dan masuk kategori **sangat berhasil**.

Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya:

1. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif,

Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan Indikator Kinerja Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 35,00 dari target 32,72 (106,97%) dan masuk kategori **sangat berhasil**.

2. Sasaran Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan terealisasi sebesar 91,04 dari target 85,00 (107,11%) dan masuk kategori **sangat berhasil**.

Sesuai yang diamanahkan dalam Permen PAN&RB Tahun 2014, laporan kinerja pelaksanaan anggaran lingkup instansi pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK);
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang capaian ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mengukur setiap indikator kinerja sasaran program (IKSP) dalam perjanjian kinerja (PK) berpedoman pada manual IKU yang ditetapkan pada saat penyusunan IKSP lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk mengukur efisiensi (E) digunakan formula berdasarkan PMK 22 Tahun 2021, sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan dikatakan efisien jika memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100%

dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.

A. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Sasaran ini merepresentasikan pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami peningkatan produktivitas atau proses pengolahan dalam suatu produksi komoditas pertanian. Nilai tambah yang semakin besar atas produk perkebunan dapat berperan bagi pertumbuhan ekonomi. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja, yaitu :

- IKSP 1. Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
- IKSP 2. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan
- IKSP 3. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI

Target dan realisasi indikator nilai tambah komoditas pertanian tahun 2022 beserta capaiannya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Target dan Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					
Sasaran Program 1					
Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1-1	Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	%	81,00	93,12	114,96%
1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	%	45,00	58,09	129,09%
1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	%	40,00	40,06	100,15%

Sumber: Ditjen Perkebunan 2022

1) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pencapaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana perkebunan, dilihat berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemanfaatan sarana perkebunan yang telah diberikan kepada kelompok tani komoditas perkebunan dengan formula sebagai berikut:

1. Pengukuran tingkat kemanfaatan menggunakan kuesioner dengan sampel penerima berdasarkan

manual IKU minimal 10% dari total penerima sedangkan dalam pelaksanaan untuk sarana pengolahan 21,54% dan untuk alat pascapanen 39,07%;

2. Kriteria/indeks yang dipergunakan yaitu:

100% jika jawaban Y (90% s.d 100%)

90% jika jawaban Y (80% s.d < 90%)

80% jika jawaban Y (70% s.d < 80%)

70% jika jawaban Y (60% s.d < 70%)

60% jika jawaban Y (50% s.d < 60%)

Tabel 14. Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan Tahun 2022

Indikator Kinerja 1-1					
Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan					
Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi 2022 dibanding Akhir Renstra 2024
81,00%	93,12%	91,11%	92,59%	82,00%	112,90

Sumber: Direktorat PPHBUN, 2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 14 realisasi kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan pada tahun 2022 adalah sebesar 93,12% dengan capaian kinerja sebesar 114,96% dari target 81,00% dengan indeks pemanfaatan 100% jika jawaban y (90% sd 100%) dan termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini menunjukkan sarana pascapanen dan

pengolahan telah dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

Realisasi kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Tahun 2022 sebesar 93,12%, bila dibandingkan dengan akhir target renstra 2024 mencapai 112,90%. Hal ini menunjukkan sarana perkebunan yang diberikan sudah dimanfaatkan oleh penerima memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan.

Tabel 15. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Tahun 2022

NO	URAIAN IKSK	JUMLAH SARANA YANG TERSEDIA TAHUN 2021 (UNIT)	JUMLAH SAMPEL UNIT	JUMLAH UNIT SARANA YANG DIMANFAATKAN	TINGKAT KEMANFAATAN 2022			KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen	238	93	84	81	94,62	116,81	84 unit sarana pascapanen yang dimanfaatkan dari 93 jumlah sampel unit
2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan	636	137	124	81	91,61	113,10	124 unit sarana pengolahan yang dimanfaatkan dari 137 jumlah sampel unit
Total/Rata-rata		874	230	208	81	93,12	114,96	

Sumber : Data Dirat PPHBun, 2022 (diolah)

Capaian kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan tahun 2022 yang tertuang pada Tabel 15:

1. Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen perkebunan mencapai 94,62% dari target 81,00% atau dengan capaian sebesar 116,81%. Jumlah sampel unit sebanyak 93 unit sarana pascapanen dari target 238 unit bantuan sarana pascapanen tahun 2021. Jenis sarana pascapanen yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu berdasarkan jenis alat yang diberikan secara kontinyu setiap tahunnya seperti pulper, huller, solar dryer portable, dan solar dryer dom. Dari 93 unit sampel sarana pascapanen, jumlah unit yang dimanfaatkan sebanyak 84 unit sarana pascapanen dan 9 unit sarana pascapanen yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Sarana pascapanen tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal yaitu :
 - a. Petani tidak melakukan petik merah (buah cherry kopi) sehingga mesin pulper tidak dimanfaatkan. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan pasar terhadap kualitas premium yang masih rendah;
 - b. Harga kopra putih yang turun drastis dan permintaan pasar yang masih rendah sehingga solar dryer dom tidak dimanfaatkan;
 - c. Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.
2. Tingkat kemanfaatan sarana pengolahan perkebunan mencapai 91,61% dari target 81,00% atau dengan capaian sebesar 113,10%. Jumlah sampel unit sebanyak 137 unit sarana pengolahan dari target 636 unit bantuan sarana pengolahan tahun 2021. Jenis sarana pengolahan yang diukur tingkat kemanfaatannya yaitu mesin pengolahan kopi, coklat, penyulingan minyak atsiri, sagu, dan karet. Dari 137 unit sampel sarana pengolahan, jumlah unit yang dimanfaatkan sebanyak 124 unit sarana pengolahan dan 13 unit yang pemanfaatannya tidak optimal. Sarana tidak dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Akibat pandemi, petani menjual produknya dalam bentuk cherry

dan greenbean sehingga mesin grinder (pembubuk) tidak dimanfaatkan secara optimal namun kondisi mesin masih bisa beroperasi dengan baik;

- b. Petani lebih memilih membeli kemasan yang sudah jadi sehingga mesin sealer tidak dimanfaatkan secara optimal namun kondisi mesin masih bisa beroperasi dengan baik;
- c. Petani masih mengolah sagu menjadi sagu basah sehingga mesin pengolahan sagu tidak dimanfaatkan, namun kondisi mesin masih beroperasi dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat konsumsi produk tepung sagu yang masih rendah;
- d. Kondisi mesin yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.

Dengan capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa sarana pascapanen dan pengolahan yang diberikan ke penerima bantuan masih dimanfaatkan dengan baik. Walaupun, ada beberapa sarana yang diberikan tidak dimanfaatkan secara optimal, tapi masih bisa beroperasi dengan baik. Diharapkan dengan adanya bantuan sarana perkebunan yang diberikan ke kelompok tani dapat memberikan nilai tambah bagi kelompok tani seperti produksi menjadi meningkat, produk yang dihasilkan bernilai tambah, mutu produk yang dihasilkan meningkat yang berpengaruh terhadap nilai jual dari produk di pasaran dan peningkatan pendapatan kelompok tani.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan pemanfaatan sarana yang diberikan antara lain:

1. Tidak seluruhnya mesin termanfaatkan dengan baik disebabkan adanya kerusakan alat dan mesin setelah melewati masa garansi dan tidak dapat diperbaiki oleh kelompok tani;
2. Trend permintaan pasar yang dinamis;
3. Pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan pada tahun berjalan belum dimanfaatkan secara optimal karena bantuan sarana diterima oleh kelompok tani umumnya setelah panen raya;
4. Kelompok tani belum sepenuhnya menguasai operasionalisasi dan perawatan alat dan mesin yang diterima.

Upaya perbaikan kedepan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan perkebunan adalah:

1. Penerima manfaat sarana pascapanen dan pengolahan merupakan kelompok tani sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan SK CP/CL yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten atau PPK pusat;
2. Bantuan sarana pascapanen dan pengolahan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengajuan proposal dan hasil verifikasi CPCL;
3. Koordinasi yang optimal antara satker pusat, provinsi dan kabupaten

terkait dengan pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

2) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT terhadap Luas Serangan OPT yang dilaporkan dengan target 45% terealisasi sebesar 56,37% atau tercapai 125,27%. Rasio didapatkan dari luas pengendalian yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu seluas 306.926 Ha dibandingkan dengan laporan luas serangan OPT yaitu 544.444 Ha. Data luas serangan dan pengendalian OPT bersumber dari laporan daerah ke

Pusat dan aplikasi Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT berbasis daring (Sipereda OPT) baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun masyarakat. Untuk kegiatan di Direktorat Perlindungan Perkebunan (APBN) pengendalian OPT dilakukan pada areal seluas 11.631 Ha yang terdiri dari Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 5.156 Ha serta Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 6.475 Ha dan terealisasi 100 % atau capaian 100%.

Mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan OPT yang terjadi pada tanaman perkebunan dengan rumus :

$$\Sigma = \frac{\text{Total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT}}{\text{Total Luas Serangan OPT}} \times 100\%$$

Tabel 16. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan.

Indikator Kinerja 1-2					
Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan					
Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi 2022 dibanding Target Akhir Renstra 2024
45,00%	58,09%	44,96%	35,57%	45,00%	129,09

Dari tabel 16 dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi pada tahun 2022 dibanding target akhir renstra 2024 mencapai 129,09%.Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT

tanaman perkebunan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah (APBD) dan masyarakat/petani yang melakukan pengendalian secara mandiri. Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja rasio serangan OPT yang

ditangani terhadap luas serangan OPT perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu segera dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat.
- b. Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir.
- c. Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan.
- d. Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di UKPBJ.
- e. Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
- f. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
- g. Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang, Petugas Pengamat dan Petugas Laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal.
- h. Pengendalian OPT oleh masyarakat secara swadaya terkendala oleh kurangnya kesadaran pekebun untuk memelihara kebunnya serta terbatasnya biaya pengendalian.

Upaya perbaikan kedepan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Perkebunan adalah:

- a. Mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan ditindaklanjuti dengan
- b. petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.

- c. Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten.
- d. Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan pelaksanaan lebih awal.
- e. Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinu baik dalam bentuk
- f. kunjungan lapang langsung, pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan Perkebunan, maupun melalui media lainnya secara daring.
- g. Menegur penanggung jawab kegiatan tingkat provinsi yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan kegiatan di lapangan.

Kegiatan pendukung untuk Area Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan yaitu Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah. Pengendalian OPT Tanaman Tahunan

dan Penyegar terdiri dari (a) Penerapan PHT OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar serta (b) Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar. Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah terdiri dari (a) Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah serta (b) Penerapan PHT OPT Tanaman Semusim dan Rempah.

3) Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI

Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40% tercapai 40,06% atau tercapai 100,15%. Rasio tersebut diperoleh dari jumlah risiko DPI tanaman yang berhasil dimitigasi seluas 701 Ha dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang berpotensi terdampak DPI seluas 1.750 Ha.

Mengukur persentase luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI dengan rumus :

$$\sum = \frac{\text{Total Luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI}}{\text{Total Luas areal Perkebunan yang terkena DPI}} \times 100\%$$

Capaian kinerja kegiatan Rasio luas area perkebunan yang ditangani

dibandingkan area terkena DPI Tahun 2022 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI

Indikator Kinerja 1-3 Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI					
Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi 2022 dibanding Target Akhir Renstra 2024
40,00%	40,06%	40,00%	39,44%	40,00%	100,15

Dari Tabel 17 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja realisasi rasio luas area yang ditangani area terkena DPI tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 100,15% hal ini menunjukkan bahwa telah mencapai target pada akhir renstra.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur.
2. Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
3. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat.
4. Pembinaan yang terus dilakukan ke daerah baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik

seperti telpon, email, atau melalui aplikasi meeting online.

5. SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu segera dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis(Juknis).Namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan pedoman teknis pusat.
- b. Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika

terdapat ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan.

- c. Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di UKPBJ.
- d. Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
- e. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
- f. Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang, Petugas Pengamat dan Petugas Laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal.

Upaya perbaikan kedepan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja rasio luas area yang

ditangani dibandingkan area terkena DPI adalah:

1. Mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten.
3. Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan pelaksanaan lebih awal.
4. Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinu baik dalam bentuk kunjungan lapang langsung, pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan Perkebunan, maupun melalui media lainnya secara daring.
5. Menegur penanggung jawab kegiatan tingkat provinsi yang dinilai lalai dalam melakukan pengawalan kegiatan di lapangan.

B. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Realisasi kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan pada tahun 2022 adalah

sebesar 2,57% dengan nilai ekspor US\$40,40 Milyar dan capaian kinerja sebesar 138,89% dari target 1,85% dan termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Data nilai ekspor produk perkebunan dihitung dari periode Januari-Desember 2022

Ekspor merupakan indikator yang paling strategis dalam pencapaian keberhasilan pengembangan komoditas perkebunan. Hal ini disebabkan dengan adanya ekspor berarti ada beberapa indikator keberhasilan yang dicapai oleh institusi yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
2. Pemasukan Devisa negara yang mampu menopang kebutuhan anggaran pembangunan perkebunan
3. Memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan sehingga berdampak kepada kesejahteraan petani/pekebun.
4. Menjamin kestabilan harga komoditas perkebunan.

5. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri
6. Memperluas pasar bagi produk Indonesia
7. Kemajuan pembangunan perkebunan komoditas andalan perkebunan yang unggul: (1) Meningkatkan jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang diolah; (2) Meningkatkan jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang melalui proses pasca panen; (3) Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menghasilkan produk komoditas ekspor perkebunan sesuai standar dan/atau regulasi yang ditetapkan; (4) Meningkatkan Jumlah produk ekspor hasil perkebunan yang dimanfaatkan.

Nilai ekspor merupakan indikator yang fleksibel dan dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan keterpaduan keenam hal tersebut diatas. Capaian sasaran meningkatnya daya saing komoditas perkebunan dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Target dan Capaian Sasaran Kinerja Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan Tahun 2022

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					
Sasaran Program 2					
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2-1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1,85	2,57	138,92%

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Pertumbuhan Nilai Ekspor Perkebunan

Data yang digunakan adalah data nilai ekspor komoditas perkebunan yang dikeluarkan oleh BPS yang kemudian diolah oleh Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan seluruh komoditas

pertanian yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I produksi. Komoditas ekspor Perkebunan yang dimaksud adalah kelapa, karet, sawit, kopi, teh, lada, kakao, cengkeh, kemiri sunan, kapas, tebu GKP, pala, jambu mete, nilam, kayu manis, tembakau, dan sagu. Capaian tersebut dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Produk Perkebunan (t)} - \text{Nilai Ekspor Produk Perkebunan (t-1)}}{\text{Nilai Ekspor Produk Perkebunan (t-1)}} \times 100\%$$

Tabel 19. Pertumbuhan Nilai Ekspor Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2022

Indikator Kinerja 2-1 Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan					
Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi 2022 dibanding Target Akhir Renstra 2024
1,85%	2,57%	43,47%	11,63%	2,10%	122,38

Sumber : Direktorat PPHBUN, 2022 (diolah).

Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan tahun 2022 meningkat (2,57%) namun volume ekspornya menurun (-1,12 kg). Realisasi indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 122,38% dari target 2,10%. Hal ini menunjukkan target jangka menengah yang telah ditetapkan (akhir renstra 2024) sudah terpenuhi dan bahkan sudah melebihi target. Hal ini berarti kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2022 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan

pada tahun mendatang. Nilai ekspor perkebunan meningkat dipengaruhi oleh jatuhnya harga dollar atau nilai tukar rupiah terhadap dollar tinggi akibat perang dagang AS dan China yang masih berlangsung. Selain itu, kondisi geopolitik mengakibatkan pengaruh penggerusan nilai tukar dollar terhadap beberapa mata uang dunia. Saat ini tinggal 40% perdagangan dunia masih memakai alat tukar dollar, tetapi Yuan dan Rubbel semakin mendominasi perdagangan apalagi muncul geopolitik di Ukraina.

Analisis penyebab capaian/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja dinyatakan bahwa pertumbuhan nilai ekspor produk perkebunan tahun 2022 masuk ke dalam kategori sangat berhasil. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat PPHP Perkebunan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan promosi bertaraf internasional seperti ODICOFF (*One Day with Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture*) maupun nasional seperti Perkebunan Indonesia Expo (Bunex), kerjasama KBRI dan back to back dengan pelaksanaan expo di negara tujuan potensi ekspor perkebunan;
2. Lobi perdagangan dengan negara mitra baru secara diplomasi bilateral, terutama terkait kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan, memberikan kemudahan perdagangan bilateral dan mencari solusi dalam hambatan non tarif;
3. Upaya strategis secara bilateral dalam perdagangan direct ekspor untuk negara tujuan ekspor utama dan menggunakan hub perdagangan untuk negara mitra baru;
4. Meningkatkan jaminan pasokan produk di tingkat produsen/ petani, memperbaiki *brand image* dalam kemasan dan ketersediaan produk secara kontinu;
5. Meningkatkan kerja sama perdagangan untuk peningkatan

akses pasar melalui optimalisasi pemanfaatan perwakilan Indonesia di luar negeri, kerja sama yang sudah berjalan dipercepat, dan tentunya dengan melakukan pengembangan kesepakatan baru;

6. Melakukan *Business matching meeting* dengan *buyer-buyer* Luar Negeri untuk terjadinya kesepakatan kerjasama dengan produsen/ pelaku usaha/ petani di Indonesia, tentunya dibawah koordinasi KBRI/ Atase Perdagangan/ Atase Pertanian;

Sedangkan permasalahan yang menyebabkan terhambatnya ekspor produk perkebunan tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi covid 19 belum sepenuhnya normal kembali, apalagi sejumlah negara Eropa sebagai salah satu pasar potensial komoditas perkebunan mengalami instabilitas pasokan energi yang akan mengancam keberlangsungan *food security* akibat kondisi geopolitik di Ukraina. Harga komoditas berfluktuasi akibat kendala di distribusi dan logistik (khususnya kendala mahalannya kontainer dan *shipping*), selain itu kondisi geopolitik di Ukraina, dinamika iklim dan persoalan pasokan produk terbatas tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan kenaikan jumlah penduduk;
2. Kebijakan negara tujuan ekspor dengan adanya hambatan tarif dan non tarif untuk melindungi pasar dalam negeri masing-masing masih menjadi tantangan pengembangan ekspor ke depan;

3. Kenaikan dan rigidnya sejumlah persyaratan dan standarisasi mutu produk di pasar LN tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas produk perkebunan dalam negeri di tingkat petani dan pelaku usaha;
4. Kurangnya pengetahuan SDM pelaku usaha dan petani terkait kebijakan ekspor, standarisasi ekspor, perdagangan internasional, mutu produk, kemasan dan isu strategis lainnya.

Upaya perbaikan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor perkebunan adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan jaringan informasi dan komunikasi secara terorganisasi antara *bussiness to bussiness* (B to B), *government to government* (G to G) dan *government to business* (G to B) baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam organisasi Internasional;
2. Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dan petani yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan kualitas, jaminan mutu dan standarisasi yang sesuai dengan standar negara mitra tujuan ekspor;
3. Memudahkan dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kemendag, Kementan, Kemenperin dan Kemenko Ekonomi. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Permentan nomor 19 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian sebagai upaya peningkatan ekspor mulai dari aspek produksi sampai hilirisasi.

C. Sasaran Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Tujuan reformasi birokrasi adalah membentuk organisasi yang agile, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan adminisitratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan *target/output* yang telah ditetapkan secara optimal. Dari waktu ke waktu, pemerintah dituntut untuk senantiasa berinovasi meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, capaian nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan tertuang pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20.Capaian Sasaran Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien

Program Dukungan Manajemen					
Sasaran Program 3					
Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	32,72	35,00	106,97%

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Sasaran Program Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien diukur dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan. Target nilai PMPRB Tahun 2022 yaitu sebesar 32,72 dan tercapai sebesar 35,00.

1) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan

sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, terdapat beberapa unsur Penilaian Tabel 21 sebagaimana berikut:

Tabel 21. Unsur Penilaian PMPRB

No	Nama Layanan	Bobot	Nilai
A.	Pengungkit		35,00
I	Pemenuhan		14,00
	1. Manajemen Perubahan	2,00	2,00
	2. Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
	4. Penataan Tata Laksana	1,00	1,00
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40
	6. Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25
	7. Penguatan Pengawasan	2,20	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,40
II	Reform		21,00
	1. Manajemen Perubahan	3,00	3,00
	2. Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00
	3. Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
	4. Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
	5. Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,75
	6. Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,30
	7. Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75

Indikator kinerja ini memiliki target sebesar 32,72 di tahun 2022. Dengan Nilai PMPRB Direktorat Jenderal

Perkebunan sebesar 35,00, capaian Indikator Kinerja ini menjadi 106,97%.

Tabel 22. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan

Indikator Kinerja 3-1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan					
Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi 2022 dibanding Target Akhir Renstra 2024
32,72 Nilai	35,00 Nilai	32,62 Nilai	32,58 Nilai	32,91 Nilai	106,35

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Berdasarkan Tabel 22 dapat dijelaskan bahwa nilai PMPRB tahun 2022 sebesar 35,00 nilai dibanding dengan target akhir renstra 2024 sebesar 32,91 atau 106,35% sudah melebihi target pada dokumen renstra.

Analisis Penyebab Capaian/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator Nilai PMPRB adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta menindaklanjuti hasil evaluasi;
2. Sosialisasi/Internalisasi Road Map/ Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan dan disampaikan kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki *Agent of Change* (AOC) yang membuat perubahan berupa Korporasi Petani dan Rumah Pintar Pekebun;
4. Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan revisi terhadap Permentan No. 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit mencabut Permentan No. 07 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permentan No. 15 Tahun 2020;
5. Penataan dan Penguatan Organisasi di Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan melalui penyusunan proses bisnis, peta lintas fungsi dan evaluasi organisasi dengan pembahasan dan penataan organisasi tata kerja sampai dengan UPT, berdasarkan RPJMN, Renstra dan rencana kerja organisasi;
6. Penyusunan SOP baru serta penyesuaian dan penyempurnaan SOP yang telah terbit;
7. Penetapan Surat Keputusan Pejabat dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
8. Penataan Analisis Jabatan telah dilakukan penyesuaian informasi jabatan dan rancangan peta jabatan di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
9. Dalam penataan sistem manajemen SDM, Direktorat Jenderal Perkebunan telah melakukan perbaikan atas implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti penyelarasan Sasaran Strategis (SS), IKU, dan target dengan strategi organisasi, *cascading* SS dan IKU dari unit manajemen hingga unit teknis, dan penyelarasan pencapaian IKU *cascading* dengan kinerja pimpinan. Pemantauan kinerja juga dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, dan semesteran, sedangkan penilaian perilaku kinerja pegawai dilakukan secara triwulanan melalui aplikasi SINERGI.

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pengembangan karir individu, yaitu sebagai salah satu dasar penentuan kenaikan peringkat jabatan dan promosi/pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural. Selain itu capaian kinerja individu juga digunakan sebagai dasar dalam pemberian reward dan dasar pemberian sanksi;

10. Penguatan Akuntabilitas dilakukan dengan penyusunan Renstra 2020-2024 yang disesuaikan dengan RPJMN dilanjutkan dengan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja serta monitoring dan evaluasi;
11. Rencana aksi/arahan pimpinan direkam dan dimonitor secara berkala;
12. Penerbitan Laporan kepada Direktur Jenderal Perkebunan (Progres TLHP BPK, BPKP, dan Itjen; Laporan Kinerja; Evaluasi SAKIP);
13. SOP Pelayanan Publik dan SOP Pengaduan Pelayanan.

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja nilai PMPRB adalah:

1. Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh KemenPANRB yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 terdapat beberapa unsur penilaian yang belum dapat memenuhi nilai secara maksimal;
2. Belum optimalnya unsur pemenuhan dan reform penguatan akuntabilitas,

penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta reform Penataan Sistem Manajemen SDM.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator kinerja nilai PMPRB adalah :

1. Direktorat Jenderal Perkebunan akan terus mengusahakan keberlanjutan dan peningkatan serta penyempurnaan 8 area perubahan khususnya untuk memenuhi unsur pemenuhan dan reform penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta reform Penataan Sistem Manajemen SDM;
2. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara periodik, diharapkan dapat mengampu tujuan reformasi birokrasi secara paripurna;
3. Mengupayakan secara terus menerus menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

D. Sasaran Pengelolaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu

tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan

prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Capaian Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian sasaran program Terwujudnya Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang Akuntabel dan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Capaian Sasaran Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Program Dukungan Manajemen					
Sasaran Program 4					
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	Nilai	85	91,04	107,11

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 2022

Sasaran Program Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dengan Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan. Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar 85,00 Nilai dan tercapai sebesar 91,04 Nilai pada tahun 2022.

1) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Berdasarkan PMK No. 22 Tahun 2021 perubahan atas PMK 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga. Formula yang digunakan yaitu:

$NK = (I \times WI) + (CH \times WCH)$; dimana $I = (P \times WP) + (K \times WK)$ $PK \times WPK + NE \times WE$

I = Nilai aspek implementasi

WI = Bobot aspek implements

CH = Capaian hasil

P = Penyerapan anggaran

WP = Bobot penyerapan anggaran

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

PK = Pencapaian keluaran

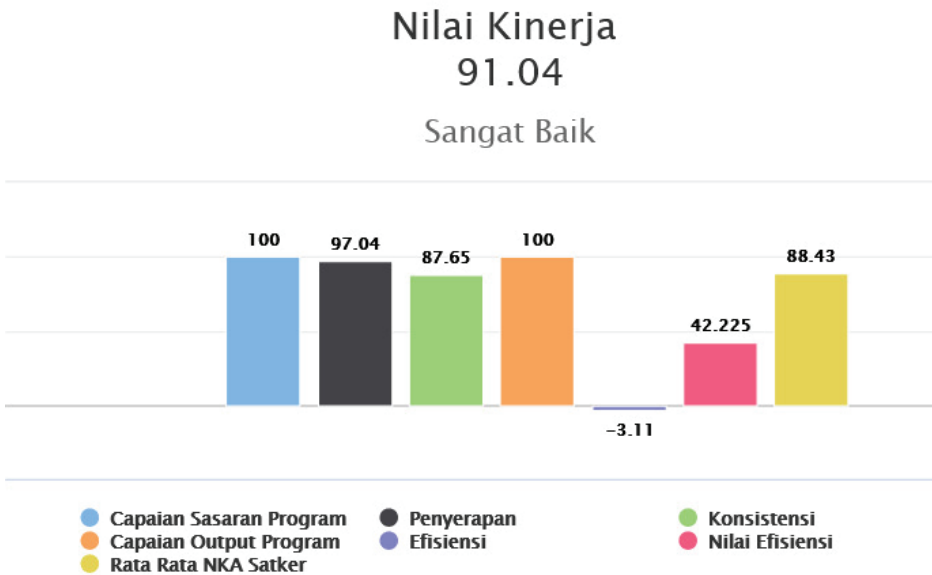
WPK = Bobot pencapaian keluaran

NE = Nilai efisiensi

WE = Bobot efisiensi

WK = Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan 2022



Gambar 3. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART 2022

Berdasarkan aplikasi SMART Kementerian Keuangan diperoleh realisasi nilai kinerja anggaran (NKA) Ditjen Perkebunan Tahun 2022 sebesar 91,04 Nilai atau mencapai 107,11% dari target 85,00 nilai dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Bila didetailkan Capaian sasaran program mencapai 100%, Realisasi anggaran

97,04%, Konsistensi 87,65%, capaian *output* program mencapai 100%, Nilai Efisiensi yang diukur menggunakan 42,22%, dan nilai rata-rata NKA satker senilai 88,43%. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan

Indikator Kinerja 4-1					
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan					
Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi 2022 dibanding Target Akhir Renstra 2024
85,00 Nilai	91,04 Nilai	79,97 Nilai	79,93 Nilai	85,00 Nilai	107,11

Sumber: Sekretariat Ditjen Perkebunan

Berdasarkan Tabel 24 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai kinerja anggaran (NKA) Ditjen Perkebunan Tahun 2022 sebesar 91,04 dibandingkan dengan target akhir tahun renstra 2024 sebesar 85,00 mencapai 107,11% dengan capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa NK tahun 2022 sudah melebihi target akhir renstra. NKA Satker lingkup Ditjen. Perkebunan jika dikelompokkan berdasarkan PMK No. 22 Tahun 2021 yang terbagi menjadi 5 (lima) kategori meliputi :

- a. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- b. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
- c. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
- d. nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang;
- e. nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan pengelompokan tersebut yang termasuk kategori **Sangat Baik** berjumlah 24 Satker, **Baik** berjumlah 52 Satker dan **Cukup** berjumlah 3 Satker.

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

- a) Perubahan kebijakan anggaran, mempengaruhi proses penyusunan

kegiatan dan penganggaran TA 2022 dan juga dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau Petunjuk Operasional Kegiatan. Seperti Revisi DIPA yang berulang kali karena efisiensi/*refocusing* anggaran sebanyak 13 kali yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana dengan realisasi penarikan dana deviasinya terlalu besar antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran karena revisi DIPA tidak selalu diikuti dengan revisi halaman III DIPA.

- b) Rendahnya nilai efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART. Dengan kondisi antara penyerapan dan capaian *output* terhadap efisiensi adalah hal yang kontraproduktif, penyerapan anggaran maksimal dan *output* yang dihasilkan tercapai maka efisiensi akan rendah dan apabila penyerapan anggaran rendah dalam hal ini 80% dengan capaian *output* tercapai maka efisiensi akan tinggi.
- c) Pencapaian target IKU yang baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi permasalahan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah:

1. Memaksimalkan nilai konsistensi dengan menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dengan lebih akurat untuk memastikan nilai konsistensi bernilai optimum;

2. Memastikan seluruh satker menginput capaian *output* dengan cara melakukan pemantauan rencana, realisasi pelaksanaan anggaran, dan pencapaian *output* kegiatan secara rutin harian ataupun berkala minimal setiap bulan berjalan;
3. Koordinasi lebih intensif dalam hal revisi DIPA maupun halaman III DIPA pada setiap triwulan, sesuai batas waktu yang ditentukan;
4. Melakukan workshop, verifikasi dan pendampingan pengisian aplikasi SMART pada satker Pusat, UPT Pusat dan daerah (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan meraih Anugerah Unit Kerja dengan Kolaborasi Informasi Publik Terbaik pada tahun 2022. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Kementerian Pertanian. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi terhadap UPT yang telah menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



2. Penghargaan Abdi Bakti Tani 2022

Penghargaan Abdi Bakti Tani adalah program Kementerian Pertanian berupa pemberian penghargaan kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) di bidang pertanian yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Penghargaan tersebut digelar setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil sejak tahun 2015. UKPP Bidang pertanian yang dianggap berprestasi dalam pelayanan publik jika telah melaksanakan pelayanan prima secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur kepada masyarakat tani. Tujuan penilaian Abdi Bakti Tani adalah mendorong dan memotivasi unit pelayanan publik untuk menggerakkan semua sumberdaya yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sehingga dapat berprestasi dalam bidang pertanian. Dalam hal ini Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon telah mendapat penghargaan tersebut pada tahun 2022 sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi Madya.



3. Perkebunan Expo (Bunex) 2022

Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) demi memperkuat dan memperluas kesinambungan usaha perkebunan melalui pengembangan bioindustri dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pelaku usaha perkebunan. Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong Era Baru Perkebunan Indonesia melalui Perkebunan Bioindustri. Perkebunan bioindustri ini dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi modern dan dicirikan dengan penggunaan varietas unggul, efisien, efektif dan integratif,

sustainable waste, ecofriendly, menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), mekanisasi pertanian serta pemanfaatan Internet of Things (IoT). Rangkaian Kegiatan Bunex 2022 dibagi menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, diantaranya Pemberian penghargaan/Anugerah Perkebunan, launching Pabrik Mini Minyak Goreng (PAMIGO), Perkebunan Partisipatif (Pasti), Ekosistem Perkebunan (Eksis), Pameran produk perkebunan, Focus Group Discussion (FGD) mengangkat topik Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Pangan dan Energi Global dan Pengembangan Perkebunan Sagu, Gula Tebu, Gula Non Tebu dalam Menghadapi Krisis Pangan dan Energi Global, Talk show Era Baru Perkebunan Indonesia dan Business matching (Forum Investasi).

- a. Pemberian penghargaan/Anugerah Perkebunan,



b. Launching Pabrik Mini Minyak Goreng (PAMIGO)



4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas adalah kebutuhan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Berdasarkan amanah dalam UU No 25 Tahun 2009, Direktorat Jenderal Perkebunan selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, BBPPTP Medan, BBPPTP Ambon dan BPTP Pontianak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong UPT Ditjen Perkebunan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan inovasi pelayanan antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Peran dan pemanfaatan teknologi informasi selain sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, juga dapat mendorong percepatan dalam

e-government atau menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik.

UPT Ditjen Perkebunan mengembangkan berbagai inovasi layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi pengguna layanan khususnya masyarakat/petani pekebun. Selain optimalisasi pemanfaatan media sosial, juga telah mengembangkan dan menyempurnakan beberapa aplikasi layanan UPT, antara lain:

- Aplikasi e-SIANI (Sahabat Setia Petani) yaitu aplikasi android yang dikembangkan oleh BBPPTP Surabaya guna mendukung efektifitas program Mobil SIANI.
- Aplikasi Pesona Seribu yaitu sertifikasi benih perkebunan secara online yang dikembangkan oleh BBPPTP Medan.
- Si Ben Mepet Ima (Proteksi Benih Mendorong Petani Maju) yaitu sistem layanan secara online yang diberikan oleh BBPPTP Ambon, antara lain layanan sertifikasi benih, pengujian mutu benih, uji mutu APH, identifikasi OPT serta data yang terkait benih dan OPT. BBPPTP Ambon berpartisipasi dalam kompetisi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian, BBPPTP Ambon memperoleh Piagam Abdi Bakti Tani sebagai Unit Kerja Pelayanan

Berprestasi Madya pada tahun 2020 dan 2022.

- d. Rumah Pintar Pekebun (RPP) merupakan Miniatur BPTP Pontianak yang dimaksudkan untuk mendekatkan seluruh layanan Balai kepada masyarakat/petani pekebun, antara lain Klinik Tanaman Perkebunan, Layanan Mobil Keliling, serta layanan data, informasi dan konsultasi terkait proteksi tanaman dan OPT. RPP sebagai unit kerja *quick wins* Kementerian Pertanian tahun 2021 dan 2022.

5. Deregulasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022/2023

Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Perubahan tersebut untuk meningkatkan capaian peremajaan kelapa sawit untuk tanaman kelapa sawit yang merupakan salah satu program strategis nasional sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

6. Pembangunan Pusat Nursery Perkebunan Untuk Swasembada Benih Nasional

Direktorat Jenderal Perkebunan membangun pusat perbenihan di 3 lokasi yaitu di Kabupaten

Batang Provinsi Jawa Tengah untuk komoditas kelapa, di Kabupaten Cianjur-Jawa Barat untuk komoditas kopi dan di Kabupaten Bombana-Sulawesi Tenggara untuk komoditas jambu mete. Pembangunan Pusat Nursery Perkebunan dilakukan melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan dan kesesuaian agroklimat untuk tanaman kelapa. Keberadaan pusat nursery yang strategis mempermudah akses penyaluran benih unggul bagi petani, menekan biaya (efisiensi) distribusi benih dan mengurangi kerusakan benih akibat panjangnya rantai pasok.

7. Program Kelapa Genjah 1 Juta Batang

Pengembangan kelapa genjah untuk memperkuat sektor pertanian menghadapi krisis pangan global dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. kelapa genjah sebar 1 juta batang dilakukan di beberapa daerah. Solo Raya menjadi salah satu lokasi pengembangannya yakni Kabupaten Sukoharjo sebanyak 110.000 batang, Karanganyar 59.000 batang dan Kabupaten Boyolali sebanyak 58.000 batang.



8. Penerjemahan Regulasi kedalam Bahasa Inggris
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris.

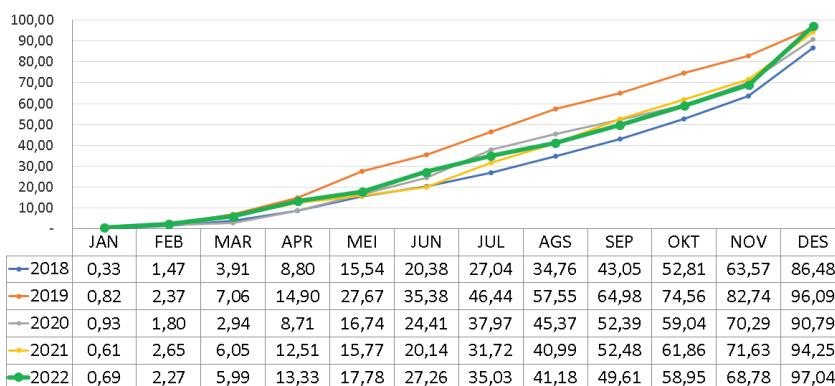
Penerjemahan Permentan tersebut menjadi panduan bagi pelaku usaha khususnya investor asing sehingga mendorong minat berusaha investor asing untuk menanamkan modalnya pada usaha sub sektor perkebunan.



3.3 Akuntabilitas Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2021, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi pembiayaan melalui APBN senilai Rp.1,044 Trilyun yang digunakan

untuk membiayai 2 program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri senilai Rp.803.179.325.000 dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp.241.348.123.000. sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan mencapai Rp.1.013.577.727.789 atau 97,04%. Berikut grafik perkembangan realisasi anggaran perbulan dari tahun 2018-2022.



Sumber : OM -SPAN Kemenkeu

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan, *refocusing* anggaran, *Automatic Adjustment* (AA) dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, dan (2) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran baik yang dilaksakan oleh

satker pusat maupun pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. APBN Direktorat Jenderal Perkebunan TA. 2022 sebagian besar atau hampir 80% dialokasikan untuk belanja barang bantuan pemerintah. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan mengampu 2 (dua) program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 24 berikut:

Tabel 25. Realisasi anggaran per unit eselon II TA 2022

Kode	Program/Kegiatan/Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	
		Anggaran (Rp)	Keuangan (Rp)	%
018.05	Ditjen. Perkebunan	1.044.527.448.000	1.013.577.727.789	97,04%
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	294.040.993.000	289.420.167.381	98,43%
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.251.062.000	81.284.661.722	98,83%
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	94.202.383.000	92.259.509.315	97,94%
5889	Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	211.832.972.000	206.632.571.189	97,55%
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan	120.851.915.000	112.739.373.656	93,29%
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	241.348.123.000	231.241.444.526	95,81%

Sumber: SPAN-Kemenkeu

Ringkasan perkembangan pagu dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan, sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja juga menyajikan pagu dan realisasi anggaran per Program/Kegiatan sampai dengan level Rincian *Output* yang dilaksanakan oleh satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan (lampiran 3). Pada Tahun 2022 penyelenggaraan pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah satker yang terdiri atas 1 Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4

satker), Satker Kabupaten (8 satker) dan Satker Dinas Provinsi (33 satker).

Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan sangat tergantung pada kinerja satker-satker, oleh karena itu upaya percepatan dan pencapaian target terus dilakukan dengan cara koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi. Dengan didukung oleh Tim Monev lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan baik pusat dan daerah dan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun

2022 telah mampu diperoleh informasi secara terbaru setiap bulannya sehingga setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan dapat selalu tersampaikan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2022

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat daerah yang lambat dalam hal proses verifikasi dan pengesahan SK CP-CL;
2. Pelaksanaan kontrak yang belum dilaksanakan sesuai komitmen yang telah disepakati;
3. Adanya dinamika dalam revisi anggaran (DIPA maupun POK) sampai dengan Triwulan ke-4 Tahun 2022;
4. Terjadinya perubahan baik lokasi maupun kelompok tani yang tidak dilaporkan;
5. Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) namun penyusunannya seringkali terlambat;
6. Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian OPT belum terkoordinir;
7. Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawasan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
8. Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun;
9. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran;
10. Sistem pengadaan barang dan jasa dengan sistem satu pintu dan Keterbatasan SDM menyebabkan pelelangan kegiatan mengantri dan mengakibatkan pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan;
11. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di daerah sulit dilaksanakan.

Upaya Perbaikan perbaikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan antara lain :

1. Percepatan proses verifikasi dan pengesahan SK CP-CL dengan Tim Teknis dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
2. Pemantauan dan monitoring daftar *outstanding* kontrak yang telah berakhir masa berakhir pelaksanaan pekerjaan.
3. Merevisi pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan melibatkan Aparat pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk

Teknis (Juknis) untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan



BAB IV **Penutup**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja semuanya masuk kategori sangat berhasil, yaitu indikator kinerja: (1) Tingkat kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan; (2) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan; (3) Rasio luas area yang ditangani dibandingkan

area terkena DPI; (4) Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan; (5) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan; (6) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keberhasilan yang telah dicapai Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam membangun perkebunan tahun 2022 khususnya perkembangan capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran program tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2022

Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain itu, juga didukung pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Berbagai keberhasilan telah dicapai Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022. Namun demikian pembangunan perkebunan masih menghadapi

beberapa permasalahan terutama (1) Tanaman Tua/ Rusak/Tidak Produktif; (2) Infrastruktur Rusak; (3) Penyediaan Bahan Tanam Unggul Belum Optimal; (4) *Good Agricultural Practices* (GAP) belum diterapkan dengan baik.

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan tersebut pada tahun 2022 Era Baru Perkebunan Indonesia: Perkebunan Bioindustri telah digaungkan reorientasi program dan manajemen yaitu: Era Baru Perkebunan Indonesia: Perkebunan Bioindustri :

- a. Program Logistik Benih Perkebunan (BUN500) (Penguatan Nursery, Perbenihan Mandiri);
- b. Pengembangan Komoditas Berbasis Kawasan (Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah);
- c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Pengendalian OPT (Peningkatan Mutu & Pengembangan Produk Perkebunan);
- d. Perkebunan Partisipatif (Pasti) (Peningkatan Kapasitas Usaha Kelapa Genjah Pandan Wangi, Korporasi Kopi (JPLM), Pabrik Mini Minyak Goreng (PAMIGO), Pengembangan Stevia;
- e. Ekosistem Perkebunan (Eksis);

f. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) (Kelapa Sawit Tumpang Sari Tanaman Pangan (Kesatria)).

Tahun 2022 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapatkan alokasi anggaran APBN Rp.1.044.527.448.000 untuk menjalankan program: (1) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (2) Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp. 1.013.577.727.789 atau **97,04%** dan capaian realisasi fisik **99,70%**

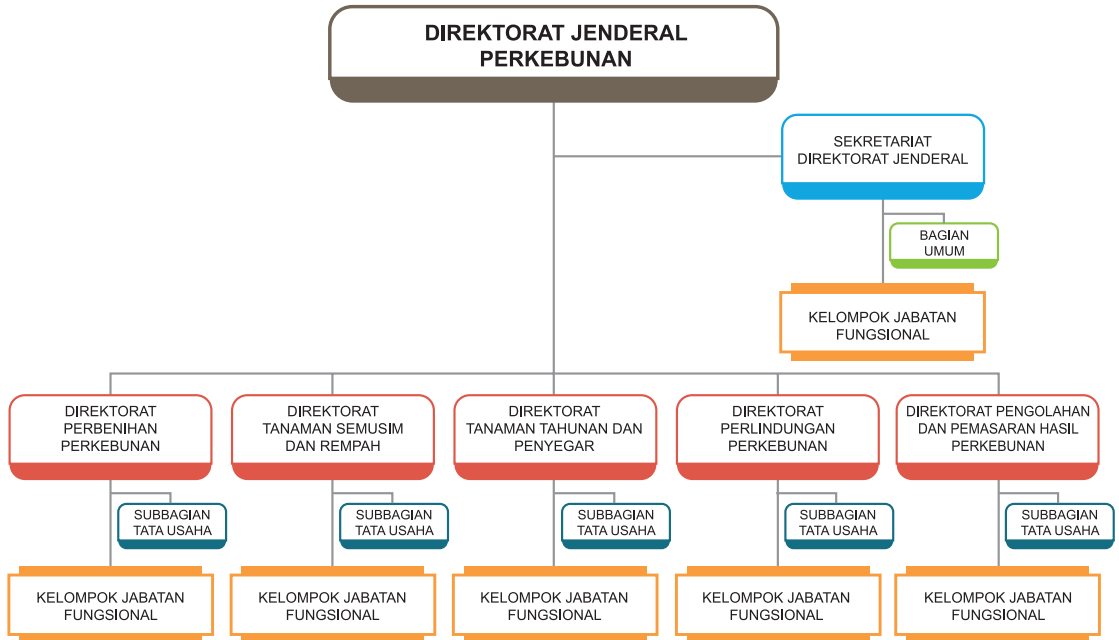
Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, kinerja pembangunan perkebunan tahun 2022 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan perkebunan, baik di pusat maupun daerah. Banyaknya unsur dan sumber daya yang terlibat dalam pembangunan perkebunan, maka sangatlah wajar kalau dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan perkebunan terletak pada komitmen dan kerja keras bersama serta sinergitas baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani/Pekebun di seluruh Indonesia.

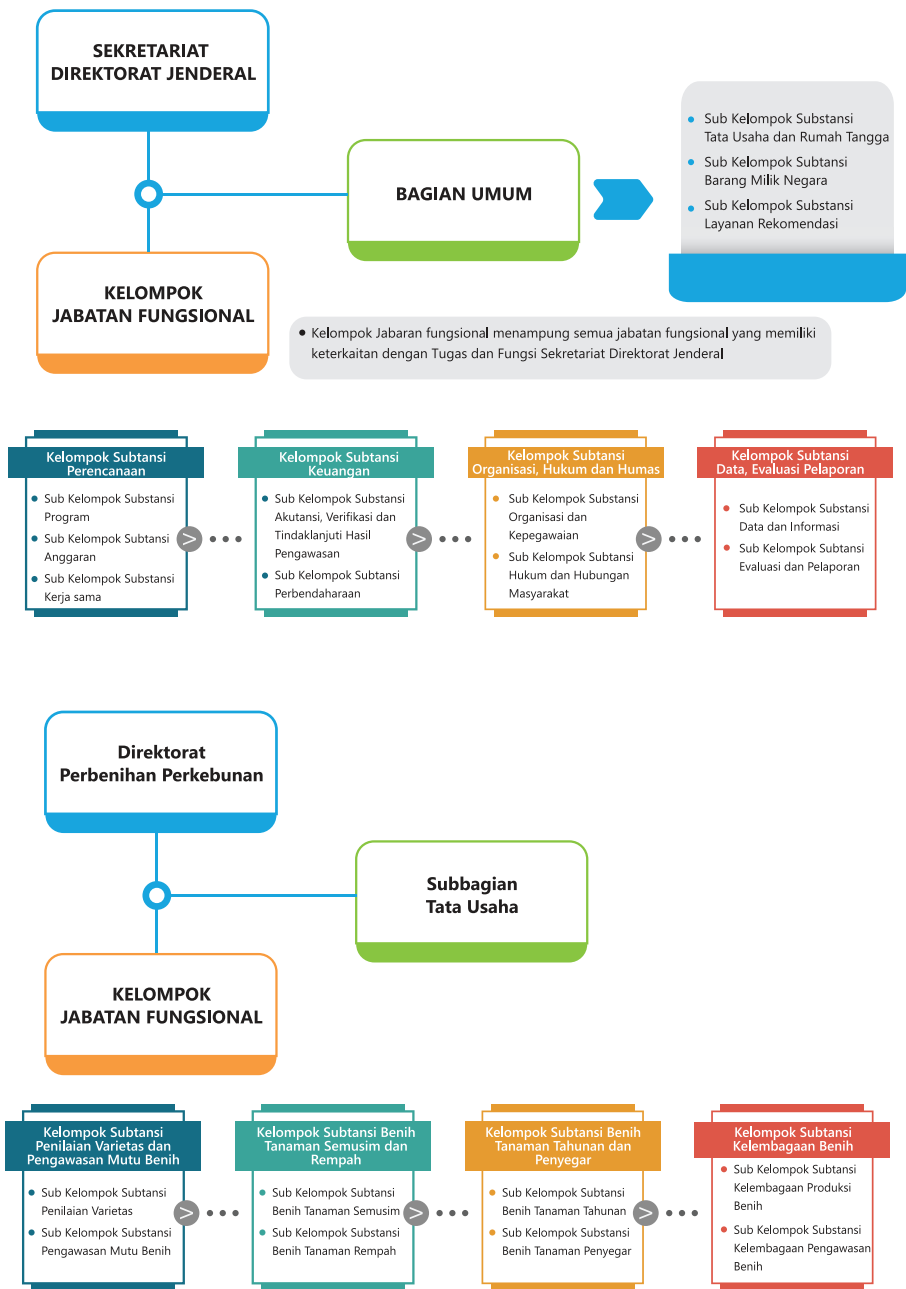


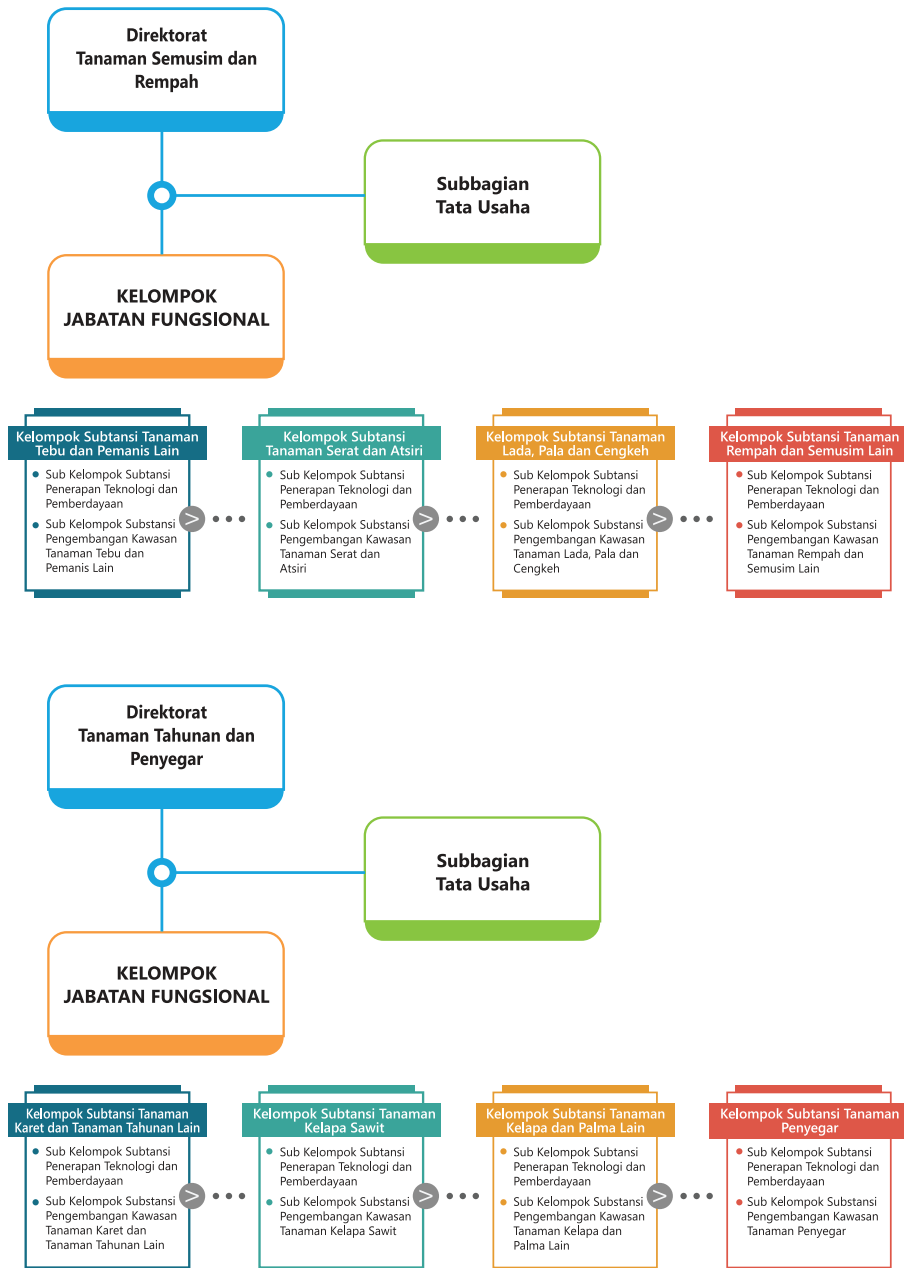
Lampiran

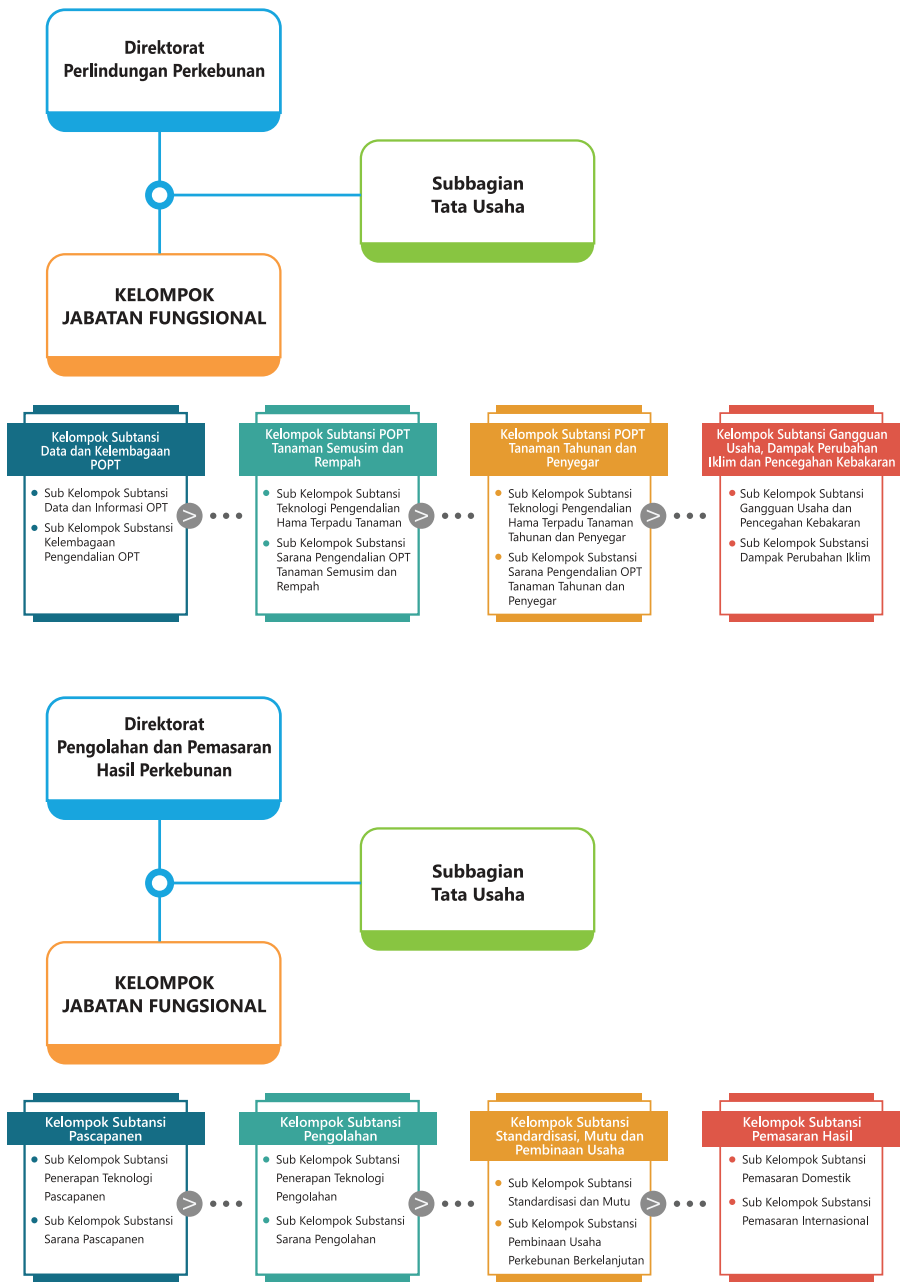
Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN









Lampiran 2

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DITJEN PERKEBUNAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syahrul Yasin Limpo
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama

Andi Nur Alam Syah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DITJEN PERKEBUNAN

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian	1-1	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	81.00 %
		1-2	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45.00 %
		1-3	Rasio luas area yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
2	Meningkatnya Daya Saing komoditas pertanian	2-1	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	1.85 %
3	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3-1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Perkebunan	32.72 Nilai
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan	85.00 Nilai

KEGIATAN

- 1 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 2 Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 803,179,325,000
Rp. 241,348,123,000

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua



Syahrul Yasin Limpo

Pihak Pertama



Andi Nur Alam Syah

Realisasi Berdasarkan Rincian Output Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu	Realisasi		Target Volume	Satuan	Realisasi Volume	%
			Keuangan	%				
018.05	Ditjen. Perkebunan	1.044.577.448.000	1.013.577.727.789	97,04%				99,70%
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	803.179.325.000	782.336.283.263	97,40%				99,60%
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	294.040.993.000	289.420.167.381	98,43%				100,00%
1777.AEA	Koordinasi	4.864.078.000	4.847.175.278	99,65%				100,00%
1777.AEA.001	Koordinasi Bimtek Movev dan Pelaporan Tanaman Tahunan dan Penyegar	4.864.078.000	4.847.175.278	99,65%	50	Kegiatan	50	100,00%
1777.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	9.354.881.000	9.104.339.174	97,32%				100,00%
1777.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Tahunan dan Penyegar	9.354.881.000	9.104.339.174	97,32%	9	NSPK	9	100,00%
1777.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	10.803.050.000	10.375.131.866	96,04%				100,00%
1777.CAI.001	Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	10.803.050.000	10.375.131.866	96,04%	950	Ha	950	100,00%
1777.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	269.018.984.000	265.093.521.063	98,54%				100,00%
1777.RAI.001	Kawasan Kopi (PEN)	89.877.531.000	88.460.163.500	98,42%	18.393	Ha	18.393	100,00%
1777.RAI.002	Kawasan Kakao (PEN)	72.557.242.000	71.988.761.420	99,22%	5.280	Ha	5.280	100,00%
1777.RAI.004	Kawasan Karet	21.399.235.000	20.849.024.751	97,43%	2.501	Ha	2.501	100,00%
1777.RAI.005	Kawasan Kelapa (PEN)	74.223.456.000	73.020.822.173	98,38%	13.080	Ha	13.080	100,00%
1777.RAI.006	Kawasan Sagu	4.768.503.000	4.722.345.076	99,03%	900	Ha	900	100,00%
1777.RAI.007	Kawasan Jambu Mete (PEN)	6.193.017.000	6.052.404.141	97,73%	1.650	Ha	1.650	100,00%
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.251.062.000	81.284.661.722	98,83%				100,00%
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	694.316.000	688.900.082	99,22%				100,00%
1779.ABR.001	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	694.316.000	688.900.082	99,22%	14	Rek Tek	14	100,00%
1779.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	5.701.974.000	5.535.266.267	97,08%				100,00%
1779.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974.000	5.535.266.267	97,08%	7	NSPK	7	100,00%
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.562.340.000	6.526.385.310	99,45%				100,00%
1779.CAG.001	Perangkat Perlindungan Perkebunan	5.201.060.000	5.201.617.981	99,63%	61	Unit	61	100,00%
1779.CAG.002	Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	1.341.280.000	1.324.767.329	98,77%	15	Paket Teknologi	15	100,00%
1779.PDC	Sertifikasi Produk	5.580.459.000	5.536.724.362	99,22%				100,00%
1779.PDC.001	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	5.580.459.000	5.536.724.362	99,22%	48	Desa	48	100,00%
1779.QDD	Facilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	200.000.000	200.000.000	100,00%				100,00%
1779.QDD.001	Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	200.000.000	200.000.000	100,00%	3	Kasus	3	100,00%
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	63.511.973.000	62.797.385.701	98,87%				100,00%
1779.RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	13.448.279.000	12.812.689.512	95,27%	701	Ha	701	100,00%
1779.RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (PEN)	50.063.694.000	49.984.696.189	99,84%	11.631	Ha	11.631	100,00%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp)		Realisasi (Rp)		Target		Satuan	Realisasi	
		Anggaran		Keuangan	%	Volume	Volume		Volume	%
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	94.202.383.000		92.259.509.315	97,94%					99,23%
5888.AEA	Koordinasi	6.063.350.000		5.997.431.514	98,91%					99,36%
5888.AEA.001	Koordinasi Bimtek Money dan Pelaporan Tanaman Semusim dan Rempah	6.063.350.000		5.997.431.514	98,91%			Kegiatan	60	98,36%
5888.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	6.433.228.000		6.106.758.743	94,93%					100,00%
5888.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Tanaman Semusim dan Rempah	6.433.228.000		6.106.758.743	94,93%			6 NSPK	6	100,00%
5888.CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	11.433.425.000		10.916.334.867	95,48%					100,00%
5888.CAI.001	Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya	11.433.425.000		10.916.334.867	95,48%			Ha	571	100,00%
5888.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	70.272.380.000		69.238.984.191	98,53%					99,11%
5888.RAI.001	Kawasan Lada	9.115.790.000		8.931.736.559	97,98%			Ha	756	94,50%
5888.RAI.002	Kawasan Pala	15.427.364.000		14.994.202.391	97,19%			Ha	5.600	100,00%
5888.RAI.003	Kawasan Gengkeh	2.106.361.000		1.982.542.822	94,12%			Ha	1.070	100,00%
5888.RAI.004	Kawasan Tebu (PEN)	34.163.167.000		33.904.631.132	99,24%			Ha	4.800	100,00%
5888.RAI.005	Kawasan Vanili	9.459.898.000		9.425.871.287	99,64%			Ha	75	98,68%
5889	Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	211.832.972.000		206.632.571.189	97,55%					99,29%
5889.ADA	Standarisasi Produk	1.996.200.000		1.952.179.039	97,79%					100,00%
5889.ADA.001	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	1.996.200.000		1.952.179.039	97,79%			Surat	671	100,00%
5889.AEA	Koordinasi	10.974.513.000		10.655.127.170	97,09%					100,00%
5889.AEA.001	Koordinasi Bimtek Money dan Pelaporan Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	10.974.513.000		10.655.127.170	97,09%			Kegiatan	112	100,00%
5889.AEH	Promosi	1.763.916.000		1.755.070.626	99,50%					100,00%
5889.AEH.001	Promosi Produk Hasil Perkebunan	1.763.916.000		1.755.070.626	99,50%			Promosi	15	100,00%
5889.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	12.520.222.000		11.396.554.287	91,03%					100,00%
5889.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Pascapanen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	12.520.222.000		11.396.554.287	91,03%			8 NSPK	8	100,00%
5889.PDA	Standarisasi Produk	14.000.000.000		13.349.787.289	95,36%					100,00%
5889.PDA.001	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Sawit Rakyat (PEN)	14.000.000.000		13.349.787.289	95,36%			STDB	20.000	100,00%
5889.RAG	Sarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	125.049.852.000		122.805.220.974	98,21%					98,79%
5889.RAG.001	Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN)	10.781.881.000		10.430.562.258	96,74%			Unit	99	100,00%
5889.RAG.002	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	114.267.971.000		112.374.658.716	98,34%			Unit	224	98,68%
5889.RBK	Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.528.269.000		44.718.631.804	98,22%					100,00%
5889.RBK.001	Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan (PEN)	17.411.993.000		17.288.244.892	99,17%			Unit	74	100,00%
5889.RBK.002	Prasarana Pengolahan Tanaman Perkebunan (PEN)	28.116.276.000		27.450.386.912	97,63%			Unit	87	100,00%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp)		Realisasi (Rp)		Target		Satuan	Realisasi		%
		Anggaran		Keuangan	%	Volume	Volume		Volume	%	
5890	Penguatan Perbenihan Perkebunan	120.851.915.000		112.739.373.656	93,29%						98,42%
5890.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.638.638.000		4.381.496.681	94,46%						100,00%
5890.ABR.001	Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan	4.638.638.000		4.381.496.681	94,46%	145	Rekomendas		145		100,00%
5890.AFA	Norma Standard Prosedur dan Kriteria	8.102.081.000		7.966.734.832	98,33%						100,00%
5890.AFA.001	Peraturan/Norma/Pedoman Perbenihan Perkebunan	8.102.081.000		7.966.734.832	98,33%	6	NSPK		6		100,00%
5890.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	4.629.364.000		4.497.961.746	97,16%						100,00%
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	2.905.177.000		2.829.423.420	97,39%	61.659.600	Batang		61.659.600		100,00%
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	1.724.187.000		1.668.538.326	96,77%	12.589.740	Batang		12.589.740		100,00%
5890.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	21.685.126.000		20.846.133.836	96,13%						99,13%
5890.RAI.001	Kebun Sumber Benih Bahan Tanam komoditi Perkebunan	21.685.126.000		20.846.133.836	96,13%	1.375	Ha		1.363		99,13%
5890.RBK	Prasarana Bidang Pertanian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	81.796.706.000		75.047.046.561	91,75%						97,90%
5890.RBK.001	Nursery (PEN)	34.396.706.000		32.670.921.636	94,98%	20	Unit		19		95,00%
5890.RBK.003	Nursery Modern - SBSN	47.400.000.000		42.376.124.925	89,40%	1	Unit		1		100,00%
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	241.348.123.000		231.241.444.526	95,81%						100,00%
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan	241.348.123.000		231.241.444.526	95,81%						100,00%
1780.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	132.613.111.000		124.109.896.508	93,59%						100,00%
1780.EBA.956	Layanan BMN	5.926.600.000		5.867.257.121	99,00%	5	Layanan		5		100,00%
1780.EBA.957	Layanan Hukum	4.660.000.000		4.604.042.966	98,80%	2	Layanan		2		100,00%
1780.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	5.964.893.000		5.960.937.044	99,93%	1	Layanan		1		100,00%
1780.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	550.676.000		541.252.691	98,29%	1	Layanan		1		100,00%
1780.EBA.962	Layanan Umum	27.844.507.000		26.581.918.427	95,47%	5	Layanan		5		100,00%
1780.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	5.656.054.000		5.588.771.804	98,81%	1	Layanan		1		100,00%
1780.EBA.994	Layanan Perkantoran	82.010.381.000		74.965.716.456	91,41%	5	Layanan		5		100,00%
1780.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.642.848.000		8.531.323.059	98,71%						100,00%
1780.EBB.951	Layanan Sarana Internal	6.385.609.000		6.311.590.759	98,84%	5	Unit		5		100,00%
1780.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.257.240.000		2.219.732.300	98,34%	2	Unit		2		100,00%
1780.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.967.935.000		4.822.304.539	97,07%						100,00%
1780.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	4.967.935.000		4.822.304.539	97,07%	850	Orang		850		100,00%
1780.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	95.124.228.000		93.777.920.420	98,58%						100,00%
1789.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.473.311.000		79.360.005.681	98,62%	81	Dokumen		81		100,00%
1789.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.594.230.000		5.480.098.656	97,96%	5	Dokumen		5		100,00%
1789.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	8.312.287.000		8.289.276.675	99,72%	5	Dokumen		5		100,00%
1780.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	744.400.000		648.539.408	87,12%	1	Layanan		1		100,00%

Realisasi Berdasarkan Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Pagu (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
1	JAWA BARAT	21.883.728.000	21.110.440.174	96,47
1	029101 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	1.650.186.000	1.645.625.975	99,72
2	029161 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	7.036.072.000	6.825.093.939	97,00
3	021215 DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	13.197.470.000	12.639.720.260	95,77
2	JAWA TENGAH	6.837.856.000	6.745.727.422	98,65
4	039098 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	1.412.818.000	1.371.733.032	97,09
5	039153 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	5.425.038.000	5.373.994.390	99,06
3	D.I. YOGYAKARTA	2.453.009.000	2.439.487.801	99,45
6	049058 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	489.720.000	488.841.585	99,82
7	049089 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I. YOGYAKARTA	1.963.289.000	1.950.646.216	99,36
4	JAWA TIMUR	6.853.549.000	6.590.004.510	99,04
8	059114 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	916.084.000	913.307.375	99,70
9	059180 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	5.737.465.000	5.676.697.135	98,94
5	ACEH	5.430.012.000	5.419.730.485	99,81
10	060100 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	1.227.018.000	1.226.619.860	99,97
11	060102 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	4.202.994.000	4.193.110.625	99,76
6	SUMATERA UTARA	5.993.491.000	5.729.015.842	95,59
12	079077 DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	900.591.000	889.105.436	98,72
13	079126 DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	5.092.900.000	4.839.910.406	95,03
7	SUMATERA BARAT	3.314.521.000	3.179.987.667	95,94
14	089083 DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT	947.987.000	938.764.700	99,03
15	089132 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2.366.534.000	2.241.222.967	94,70
8	RIAU	12.776.062.000	12.776.203.556	98,38
16	099270 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	889.951.000	886.316.714	99,59
17	099316 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	3.952.167.000	3.815.543.042	96,54
18	091328 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	8.144.944.000	8.074.343.800	99,13
9	JAMBI	22.437.833.000	22.283.972.970	99,31
19	109071 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	1.088.585.000	1.085.351.200	99,70
20	109120 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	21.349.248.000	21.198.621.770	99,29
10	SUMATERA SELATAN	11.297.466.000	11.110.981.829	98,35
21	119081 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.059.608.000	1.045.138.753	98,63
22	119132 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	10.237.858.000	10.065.843.076	98,32

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Pagu (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
11	LAMPUNG	6.023.920.000	5.960.473.210	98,95
23	129072 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	1.083.398.000	1.064.535.250	98,26
24	129114 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	4.940.522.000	4.895.937.960	99,10
12	KALIMANTAN BARAT	3.562.252.000	3.537.021.084	99,29
25	139076 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	938.601.000	936.105.137	99,73
26	139127 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2.623.651.000	2.600.915.947	99,13
13	KALIMANTAN TENGAH	3.842.231.000	3.605.353.300	93,83
27	149067 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	541.451.000	540.332.600	99,79
28	149116 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3.300.780.000	3.065.020.700	92,86
14	KALIMANTAN SELATAN	7.330.622.000	6.965.818.991	95,02
29	159064 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	630.768.000	604.823.711	95,89
30	159109 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6.699.854.000	6.360.995.280	94,94
15	KALIMANTAN TIMUR	2.801.774.000	2.755.894.950	98,36
31	169066 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	596.704.000	594.215.300	99,58
32	169114 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.205.070.000	2.161.679.650	98,03
16	SULAWESI UTARA	21.288.767.000	21.155.864.912	99,38
33	179062 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	1.387.426.000	1.383.032.252	99,68
34	179105 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	19.901.341.000	19.772.832.660	99,35
17	SULAWESI TENGAH	11.727.064.000	11.594.150.362	98,87
35	189084 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.201.684.000	1.195.555.000	99,49
36	189133 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	8.304.831.000	8.189.887.362	98,62
37	180345 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	2.220.549.000	2.208.708.000	99,47
18	SULAWESI SELATAN	33.566.633.000	33.356.835.227	99,37
38	199078 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.445.446.000	1.442.654.950	99,81
39	199127 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	20.801.933.000	20.668.235.384	99,36
40	190638 DINAS PERTANIAN KAB. TANA TORAJA	2.379.834.000	2.308.950.909	97,02
41	199411 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	4.908.531.000	4.906.640.499	99,96
42	199572 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR	4.030.889.000	4.030.353.485	99,99
19	SULAWESI TENGGARA	46.148.812.000	46.148.012.700	99,35
43	209008 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	1.071.515.000	1.067.940.000	99,67
44	209109 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	14.692.027.000	14.645.711.300	99,68
45	205477 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	3.784.500.000	3.762.600.000	99,42
46	200831 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA	26.901.770.000	26.671.761.400	99,15
20	MALUKU	5.726.051.000	5.538.760.284	96,73
47	219001 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	798.822.000	798.822.000	100,00
48	219092 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	4.927.229.000	4.739.938.284	96,20

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Pagu (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
21	BALI	5.780.530.000	5.578.453.936	96,50
49	229061 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	659.251.000	634.027.615	96,17
50	229101 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	5.121.279.000	4.944.426.321	96,55
22	NUSA TENGGARA BARAT	7.045.792.000	6.834.623.850	97,00
51	239072 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	651.768.000	650.798.050	99,85
52	239128 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	6.394.024.000	6.183.825.800	96,71
23	NUSA TENGGARA TIMUR	4.824.673.000	4.817.702.726	99,86
53	249031 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1.028.303.000	1.024.303.700	99,64
54	249160 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3.796.673.000	3.793.399.026	99,91
24	PAPUA	6.390.664.000	6.138.824.702	96,06
55	259060 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1.341.692.000	1.341.692.000	100,00
56	259099 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	5.048.972.000	4.797.132.702	95,01
25	BENGKULU	4.393.471.000	4.144.784.702	94,34
57	269065 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	655.501.000	652.348.000	99,52
58	269111 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	3.737.970.000	3.492.436.702	93,43
26	MALUKU UTARA	11.132.988.000	11.116.671.782	99,85
59	289035 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	843.687.000	843.687.000	100,00
60	289105 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	10.289.301.000	10.272.984.782	99,84
27	BANTEN	1.882.720.000	1.878.275.936	99,76
61	299347 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	504.951.000	504.307.936	99,87
62	299382 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	1.377.769.000	1.373.968.000	99,72
28	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.287.539.000	4.224.574.434	98,53
63	309033 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	674.815.000	663.429.275	98,31
64	309165 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.612.724.000	3.561.145.159	98,57
29	GORONTALO	4.870.237.000	4.868.787.200	99,97
65	319057 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	665.034.000	664.930.000	99,98
66	319090 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	4.205.203.000	4.203.857.200	99,97
30	KEPULAUAN RIAU	1.262.542.000	1.165.495.200	92,31
67	329027 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	449.247.000	412.944.500	91,92
68	329079 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	813.295.000	752.550.700	92,53

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	Pagu (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	%
31	PAPUA BARAT	13.219.264.000	13.205.343.800	99,89
69	330023 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	958.513.000	954.613.000	99,59
70	330024 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	12.260.751.000	12.250.730.800	99,92
32	SULAWESI BARAT	4.543.865.000	4.482.772.061	98,66
71	340999 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	574.633.000	566.605.000	98,60
72	341001 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3.969.232.000	3.916.167.061	98,66
33	KALIMANTAN UTARA	1.886.516.000	1.587.750.892	84,16
73	417669 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	368.926.000	368.926.000	100,00
74	417670 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.517.590.000	1.218.824.892	80,31
34	BALAI/PUST	181.674.945.000	175.453.238.066	96,58
75	567338 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	71.904.253.000	69.404.717.168	96,52
76	567408 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	61.551.145.000	59.371.546.409	96,46
77	567521 BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	14.817.262.000	13.916.840.682	93,92
78	567717 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	33.402.285.000	32.760.133.807	98,08
35	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	526.316.979.000	506.806.186.753	96,29
79	238830 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	526.316.979.000	506.806.186.753	96,29
	TOTAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	1.044.527.448.000	1.013.577.727.789	97,04

Data Nilai Ekspor Komoditas Perkebunan Tahun 2018-2022

No	Komoditas	Nilai Ekspor (000 US\$)					Pertumbuhan Nilai	
		2018	2019	2020	2021	2022	2021-2022 (%)	2021-2022 (%)
1	Kelapa	1.268.425,44	890.810,33	1.171.839,94	1.650.421,94	1.718.223,64		4,11
2	Karet	4.166.902,95	3.654.931,47	3.246.592,04	4.122.649,67	3.654.414,98		-11,36
3	Kelapa Sawit	19.090.310,48	16.801.685,88	19.707.894,45	30.337.660,45	31.488.830,29		3,79
4	Kopi	815.932,62	883.123,37	821.932,09	858.558,10	1.149.168,14		33,85
5	T e h	108.451,21	92.347,33	96.323,50	89.157,95	89.989,91		0,93
6	Lada	152.475,27	147.342,62	160.387,77	166.751,10	148.107,55		-11,18
7	Kakao	1.245.800,03	1.198.734,65	1.244.183,65	1.206.775,30	1.262.058,74		4,58
8	Cengkeh	101.766,03	111.537,12	176.540,02	96.054,01	56.909,14		-40,75
9	Vanilli	74.031,11	69.609,68	60.247,74	39.930,46	22.985,21		-42,44
10	Pala	111.683,97	138.024,16	158.420,13	198.114,04	185.763,38		-6,23
11	Kayu Manis	141.489,31	133.734,16	151.292,04	160.687,63	131.449,12		-18,20
12	Jambu Mete	141.602,28	154.770,92	149.747,90	114.909,79	60.303,45		-47,52
13	Sagu	3.216,10	3.276,99	2.860,90	2.467,38	4.114,21		66,74
14	Nilam	129.886,53	116.054,85	113.833,95	135.140,94	166.553,07		23,24
15	Tembakau	169.055,24	201.976,38	195.918,69	213.408,11	266.025,60		24,66
16	Tebu	142,84	122,38	37,39	19,89	20,99		5,52
Jumlah		27.721.171,41	24.598.082,29	27.458.052,20	39.392.706,76	40.404.917,41		2,57

Lampiran 6

Data Sampel Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen 2021 (t-1)

No	PROVINSI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih	
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Jawa Tengah	Pati	Wanasari Porwojati	Gunung Sari	Tlogowungu	Kopi	2	Pulper		1	1	
2	Jawa Tengah	Pati	Perkumpulan Tani Muda Makmur	Payak	Cluwak	Kopi	1	Huller	1		1	
3	Jawa Tengah	Jepara	Ngudi Makmur	Batealit	Batealit	Kopi	1	Pulper	1		1	
4	Jawa Tengah	Jepara	Sido Mulyo 6	Ds. Tanjung	Pakis Aji	Kopi	1	Pulper	1		1	
5	Jawa Tengah	Temanggung	Pemuda Mandiri	Sucen	Gemawang	Kopi	2	Pulper	1		1	
6	Jawa Tengah	Temanggung	Nunggal Roso	Kalimanggis	Kaloran	Kopi	3	Timbangan	1		1	
7	Jawa Tengah	Temanggung	Among Tani Lima	Giripurno	Ngadirejo	Kopi	2	Huller	1		1	
8	Jawa Tengah	Temanggung	Gapoktan Argo Tani	Candisari	Bansari	Kopi	1	Pulper	1		1	
9	Jawa Tengah	Temanggung	Gapoktan Nunggal Rasa	Kalimanggis	Kaloran	Kopi	2	Huller	1		1	
10	Jawa Tengah	Wonosobo	Sumber Tani	Candi	Selomerto	Kopi	2	Pulper	1		1	
11	Jawa Tengah	Magelang	Berkah Tani	Pasangsari	Windusari	Kopi	2	Huller	1		1	
12	Jawa Tengah	Magelang	Lingkar Hijau	Pager Gunung	Ngablak	Kopi	3	Solar Dryer Portable	1		1	
13	Jawa Tengah	Karanganyar	Karya Mandiri	Anggras Manis	Jenawi	Kopi	2	Portable	1		1	
14	Jawa Tengah	Magelang	Sido Maju	Ngemplak	Widusari	Kopi	3	Huller	1		1	
15	Jawa Tengah	Wonosobo	Margo Rejeki	Sukorejo	Mojo Tengah	Kopi	3	Solar Dryer Dome	1		1	
							2	Pulper	1		1	
							3	Timbangan Duduk	1		1	

No	PROPINSI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	
16	Jawa Tengah	Boyolali	Subur Makmur I	Merian	Tamansari	Kopi	1 2 3	Pulper Huller Timbangan	1 1 1		1 1 1
17	Jawa Tengah	Karanganyar	Rezeki Barokah	Angras Manis	Jenawi	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
18	Jawa Tengah	Karanganyar	Karya Mandiri	Angras Manis	Jenawi	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
19	Jawa Tengah	Karanganyar	Wonosari Tani IV	Wonorejo	Jatioso	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
20	Jawa Barat	Sukabumi	Rimba Jaya	Sukamanah	Gegerbitung	Kopi	1 2 3	Pulper Huller SDP	1 1 1		1 1 1
21	Jawa Barat	Bandung	Hanesland Mountain	Cisundari	Pasir Jambu	Teh	1 2 3 4	Steamer Oven Grinder Teh Sealer	1 1 1 1		1 1 1 1
22	Jawa Barat	Kuningan	Sirkah 313	Pakembangan	Mandirancan	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
23	Jawa Barat	Kuningan	Sarimukti.	Karangsari	Darma	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
24	Jawa Barat	Bogor	Taruna Tani Pacing	Pasir Buncir	Caringin	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
25	Jawa Barat	Bogor	Barakatun Nabaat	Wates Jaya	Cigombong	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
26	Jawa Barat	Garut	Reog Hejo	Mandalasari	Kadungora	Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
27	Jawa Barat	Garut	Patrol Mukti	Dano	Leles	Kopi	1 2	Pulper Huller		1 1	1 1
28	Bali	Bangli	Arabica Catur			Kopi	1 2	Pulper Huller	1 1		1 1
29	Banten	Serang	Pecinta Alam	Cikolelet	Cinangka	Kopi	1 2	Huller Pulper	1 1		1 1
30	Bengkulu	Kepahiang	Permata Sari	Bukit Sari	Kabawetan	Kopi	1	Solar Dryer Dome	1		1
31	DIY	Gunung Kidul	Melati Indah	Ngalang	Gedung Sari	kakao	1	Solar Dryer Portable	1		1
32	DIY	Gunung Kidul	Ngudi Raharjo 2	Bundao	Patok	Kakao	1	Solar Dryer Portable	1		1
33	Jawa Timur	Madiun	Gondo Arum	Kare	Kare	Kakao		Solar Dryer Portable	1		1
34	Jawa Timur	Jombang	Banyon	Carangwulung	Wonosalam	Kakao	1 2	Huller Pulper	1 1	1	1 1
35	Jawa Timur	Blitar	Margo Maju	Modangan	Nglekok	Kakao	1	Solar Dryer Portable	1		1
36	Jawa Timur	Blitar	Tirto Mulyo	Kemloko	Nglekok	Kakao	1	Solar Dryer portable	1		1

No	PROPOSISI	Kabupaten	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat		Komoditas	No	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih	
				Desa	Kecamatan				Ya	Tidak	Ya	Tidak
37	Jawa Timur	Jombang	Sumber Gogor	Wonosalam	Wonosalam	Kopi	1	Huller	1		1	
							2	Pulper	1		1	
38	Kalbar	Bengkayang	Prajo Sejahtera	Pisak	Tujuh Belas	Lada		Solar Dryer Portable	1		1	
39	Lampung	Lampung Selatan	Sri Rejeki 2	Semanak	Bakauheni	Kopi	1	Pulper		1	1	
							2	Huller	1		1	
40	Lampung	Lampung Selatan	Ngudi Makmur	Toto Harjo	Bakauheni	Kopi	1	Pulper		1	1	
							2	Huller	1		1	
41	Maluku Utara	Halmahera Utara	Gamsungi Tani I	Suka Maju	Tabelo Barat	Pala	1	Solar Dryer Dome	1		1	
42	Maluku Utara	Halmahera Barat	Gam Jaha	Hatebicara	Jailolo	Kelapa	1	Solar Dryer Dome		1	1	
43	Maluku Utara	Halmahera Barat	Green Albarokah	Peot	Sahu	Kelapa	1	Solar Dryer Dome		1	1	
44	NAD	Aceh Jaya	Jak Beusare I	Teupin Ara	Teunom	Kelapa		Pengupas Sabut Kelapa	1		1	
45	NAD	Aceh Besar	Ue Dalam	Ujung Keupula	Seulimeum	Kelapa		Pengupas Sabut Kelapa		1		1
							1	Pulper	1		1	
46	NTB	Lombok Tengah	SINAR UTAMA	Lantan	Batukiliang Utara	Kopi	2	Huller	1		1	
							3	Solar Dryer Portable	1		1	
47	Sumatera Barat	Solok	Sarasah Indah Saiyo	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Kopi	1	Pulper	1		1	
48	Sumatera Barat	Solok	Sapan Saiyo	Aie Dingin	Lembah Gumanti	Kopi	1	Pulper	1		1	
							2	Huller	1		1	
								Jumlah	84	9	92	1
								Rata-rata Pemanfaatan	0,90		0,99	
								Capaian :	116,82%			

Rata-Rata

$$= \frac{\sum \text{unit alat yang dimanfaatkan atau masih operasional}}{\sum \text{unit sampel}}$$

Tingkat Kemanfaatan

$$= \frac{(\sum \text{rata-rata unit alat yang dimanfaatkan} + \sum \text{rata-rata unit alat yang masih operasional}) \times 100\%}{2}$$

Capaian

$$= \frac{\text{Tingkat kemanfaatan} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Data Sampel Tingkat Kemanfaatan Sarana Pengolahan 2021 (t-1)

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat	Jenis bantuan	Pemanfaatan Ya	Pemanfaatan Tidak	Masih Operasional Ya	Masih Operasional Tidak
1	Bengkulu	Rejang Lebong	Kopi	Arba Jaya Tani	Desa IV suku Menanti, Sindang Datarab	Mesin Penyangrai	1		1	
						Mesin Pembubuk	1		1	
		Kepahiang	Kopi	Batu Bandung Jaya	Bary Bandung, Murara Kemumu	Mesin Pengemas	1		1	
						Bangunan UPH	1		1	
						Mesin Penyangrai	1		1	
2	Jawa Barat					Mesin Pembubuk	1		1	
						Mesin Pengemas	1		1	
		Kab. Bandung	Kopi	Mandala Wangi	Cipeujeuh, Pacet	Bangunan UPH	1		1	
						Scaler	1		1	
						Roasting	1		1	
3	Jawa Timur					Grinder	1	1	1	
						Mesin Penyulingan Atsiri Sereh Wangi	1		1	
		Subang	Sereh Wangi Atsiri	Kahuripan Batu Alam	Cisarua, Karang Anyar, Jampang Kulon Batukarut, Talagasari, Serengpanjang	Mesin Penyulingan Atsiri Sereh Wangi	1		1	
						Bangunan UPH	1		1	
						Mesin Penyulingan Atsiri Pala	1		1	
		Purwakarta	Pala	Subur I	Sukamaju, Cibeber, Kiarapedes	Bangunan UPH	1		1	
						Grinder	1		1	
		Probolinggo	Kopi	Makmur 1	Dusun Selatan, desa bermi Kec. Krucil	siler	1		1	
						roasting	1		1	
						Grinder	1	1	1	
						siler		1	1	
						roasting	1		1	
		Madiun	Kakao	Wanita Tani Keluarga	Dusun karangtengah desa tambelang kec.krucil	Mesin Sangrai Kako	1		1	
						Mesin pemecah kulit	1		1	
						Mesin pemasta kasar	1		1	
						Mesin pemasta halus	1		1	
						Mesin Conching	1		1	
						Mesin Tempering	1		1	
						Mesin Pencetak Adonan	1		1	
						Mesin Pembubuk Coklat	1		1	
						Mesin Pengayak Coklat	1		1	
						Mesin Pencampur Bubuk	1		1	
		Jombang	Kopi	Tani Bayon	Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam	Grinder	1	1	1	1
						siler		1	1	
						roasting	1		1	
		Nganjuk	Kopi	Setyo Tuhu	Kecamatan Sawahan	siler		1	1	
						roasting	1		1	
						grinder	1	1	1	1

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional	
							Ya	Tidak	Ya	Tidak
4	Jawa Tengah	Karangayar	Kopi	Tani Guyup Rukun	Kecamatan Tawangmangu, kelurahan Tawangmangu	grinder	1		1	
						roasting	1		1	
						siler	1		1	
	Kendal		Kopi	Tamin Tani	Taman Rejo, Sukarejo	Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						siler	1		1	
	Temanggung		Kopi	Amrih Mulyo Lancar	Muncar Gemawang	Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						siler	1		1	
	Jepara		Kopi	Sri Rejeki 03	Dudakawu, Kembang	Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						siler	1		1	
	Pemalang		Kopi			Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						siler	1		1	
	Pati		Kopi			Grinder	1		1	
						siler	1		1	
						Roasting	1		1	
	Wonosobo		kopi	KWT Margo Rejeki	Dusun Kebondalem Desa Sukorejo Kecamatan M	Grinder	1		1	
						siler	1		1	
						Roasting	1		1	
	Banjarnegara		kopi	Karya Mukti	Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran	Grinder	1		1	
						siler	1		1	
						Roasting	1		1	
	Magelang		Kopi	Kelompok Tani Tentrem	Desa Gondongsari, Kecamatan Pakis	siler	1	1	1	
						roasting	1		1	
						grinder	1	1	1	1
	Boyolali		Kopi	Tani Ngudi Utomo	Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kab. Boyol	siler	1		1	
						roasting	1		1	
						grinder	1	1	1	1
	Klaten		Kopi	Tani Giri Mulyo	Desa Gondongsari, Kecamatan Pakis, Kabupaten	siler	1		1	
						roasting	1		1	
						grinder	1	1	1	1
5	Maluku	Maluku Tengah	Kelapa	Mulia Abadi	Sakanusa, Haya, Tehoru	Alat Pengolahan Kelapa	1			1
6	NTB	Sumbawa	Kopi	Air Gading		Pulper	1		1	
						Huller	1		1	
						Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						Sealer	1		1	

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional	
							Ya	Tidak	Ya	Tidak
7	Sulawesi Selatan	Bantaeng	Kopi	Naik Daun	Jl. Dampang, rt 03, rw03 desa gantarangkeke, kec	Pulper	1		1	
						Huller				
						Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						Sealer	1		1	
				Tringgi Moncong	Jl. Talle, Desa Bonto Tapalang, Kec. Tompo Bulu	Pulper	1		1	
						Huller	1		1	
						Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						Sealer	1		1	
8	Sulawesi Tenggara	Konawe	Sagu	Waturai		Mesin Pemarat dan Ekstrak Sagu	1		1	
						Mesin Pemas Sagu	1		1	
						Mesin Peneupung Sagu		1		1
						Mesin Pengayak Sagu		1		1
						Mesin Pengemas Sagu		1		1
						Genset	1		1	
						Pompa Air Alkon	1		1	
						Terpal	1		1	
						Bak Pengendapan	1		1	
9	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Karet	Tani Sehati	Bunga Putih, Sebulu	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Tani Makmur	Giri Agung, Marangkayu	Alat Pengolahan Karet	1		1	
		Kota Balikpapan	Karet	Tunas Jaya	Lamaru, Balikpapan Timur	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Jalan Baimbai	Lamaru, Balikpapan Timur	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Karya Baru IV	Lamaru, Balikpapan Timur	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Subur Abadi	Teritip, Balikpapan Timur	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Tunas Karya Harapan Makmur	Teritip, Balikpapan Timur	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Tanah Leluhur	Karang Joang, Balikpapan Utara	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Harapan Sejahtera	Karang Joang, Balikpapan Utara	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Mekar Tani Sejahtera	Karang Joang, Balikpapan Utara	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Suka Meju	Karang Joang, Balikpapan Utara	Alat Pengolahan Karet	1		1	
			Karet	Karya Mukti	Karang Joang, Balikpapan Utara	Alat Pengolahan Karet	1		1	
10	Bali	Buleleng	Kopi	Subak Abian Tegal Sari	Sebudi, Selat	Mesin Penyengrai	1		1	
						Mesin Pembubuk	1		1	
						Mesin Pengemas	1		1	
						Bangunan UPH	1		1	
		Bangli	Kopi	Arabika Catur	Banjar lampu Desa Catur, Kec. Kintamani	Grinder	1		1	
						Sealer	1		1	
						Roasting	1		1	
			Kopi	Jaya Mas Mandiri	Banjar Pengotan, Desa Pengotan, Kec. Bangli	Roasting	1		1	
						Grinder	1		1	
						Sealer	1		1	

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Nama Poktan/Gapoktan	Alamat	Jenis bantuan	Pemanfaatan		Masih Operasional	
							Ya	Tidak	Ya	Tidak
11	NTB	Lombok Tengah	Kopi	KWT Suli Asih	Alk Berik, Batu Kiang Utara	Mesin Penyangrai	1		1	
						Mesin Pembubuk	1		1	
						Mesin Pengemas	1		1	
		Lombok Timur	Kopi	Semabalun Hijau	Semabalun Lawang, Sembalun	Mesin Penyangrai	1		1	
						Mesin Pembubuk	1		1	
						Mesin Pengemas	1		1	
12	NTT	Manggarai Timur	Kopi	Nendong Nai	Cocol, Ponco Ranaka Timur	Mesin Penyangrai	1		1	
						Mesin Pembubuk	1		1	
						Mesin Pengemas	1		1	
						Bangunan UPH	1		1	
13	Papua	Jayapura	Sagu	Gakurakucho	Skouw Yambe, Muarlatami	Alat Pengolahan Sagu	1		1	
			Sagu	Chisai Wangi	Skouw Yambe, Muarlatami	Alat Pengolahan Sagu	1		1	
		Mimika	Sagu	Cendrawasih Jaya	Iwaka, Iwaka	Alat Pengolahan Sagu dan Bangunan UPH	1		1	
		Mapapi	Sagu	Rio Tamang	Yatan, Nambiomon Bapai	Alat Pengolahan Sagu dan Bangunan UPH	1		1	
			Sagu	Mirir	Linggua, Nambiomon Bapai	Alat Pengolahan Sagu dan Bangunan UPH	1		1	
			Sagu	Mangenem	Yatan, Nambiomon Bapai	Alat Pengolahan Sagu dan Bangunan UPH	1		1	
			Sagu	Madio	Nambiomon Bapai	Alat Pengolahan Sagu dan Bangunan UPH	1		1	
14	Papua Barat	Sorong	Sagu	Katumuk	Katnim, Salawati	Alat Pengolahan Sagu	1		1	
			Sagu	Fillime	Nijimur, Moisegen	Alat Pengolahan Sagu	1		1	
						Jumlah	123	14	128	9
						Rata-Rata Pemanfaatan	0,90	0,10	0,93	0,07
						Capaian	91,61%			
							113,09%			

Rata-Rata

$$= \frac{\sum \text{unit alat yang dimanfaatkan/masih operasional}}{\sum \text{unit sampel}}$$

Tingkat Kemanfaatan

$$= \frac{(\sum \text{rata-rata unit alat yang dimanfaatkan} + \sum \text{rata-rata unit alat yang masih operasional}) \times 100\%}{2}$$

Capaian

$$= \frac{\text{Tingkat kemanfaatan} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker Lingkup Ditjen. Perkebunan Ta 2022

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1	29101	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	99,81	99,72	99,09	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
2	200477	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KOLAKA	99,81	99,42	99,27	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
3	79077	DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	99,70	98,72	99,01	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
4	190638	DINAS PERTANIAN KAB. TANA TORAJA	99,56	97,02	99,19	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
5	139076	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN	99,47	99,73	97,21	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
6	567717	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) AMBON	99,20	98,08	96,65	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
7	149116	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	98,88	92,86	97,65	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
8	567408	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN	98,68	96,46	94,65	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
9	159064	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	98,65	95,89	96,96	100,00	19,45	98,62	Sangat Baik
10	417669	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	98,64	100,00	92,54	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
11	189084	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI	97,37	99,49	97,87	100,00	16,94	92,35	Sangat Baik
12	139127	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN	96,56	99,13	81,55	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
13	259060	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	96,55	100,00	81,04	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
14	249031	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	96,41	99,64	95,98	100,00	16,05	90,12	Sangat Baik
15	330023	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	96,35	99,59	80,18	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
16	200831	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA UTARA	95,67	99,15	94,84	100,00	15,37	88,43	Sangat Baik
17	330024	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	95,15	99,92	73,37	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
18	329079	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	95,10	92,53	96,68	100,00	15,01	87,53	Sangat Baik
19	299347	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	93,09	99,87	62,12	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
20	289035	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	92,81	100,00	60,50	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
21	180345	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TOLI-TOLI	92,78	99,47	60,62	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
22	417670	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	92,51	80,31	69,34	100,00	20,00	100,00	Sangat Baik
23	189133	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI	91,13	98,62	98,05	100,00	8,27	70,69	Sangat Baik
24	289105	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	91,02	99,84	82,09	100,00	12,02	80,05	Sangat Baik

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
25	199127	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	89,69	99,36	99,95	100,00	5,68	64,19	Baik
26	329027	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	89,55	91,92	93,71	100,00	8,08	70,20	Baik
27	299382	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	89,42	99,72	42,03	100,00	20,00	100,00	Baik
28	259099	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	89,41	98,64	42,54	100,00	20,00	100,00	Baik
29	238830	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	89,19	96,29	90,04	100,00	7,92	69,80	Baik
30	149067	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	88,61	99,79	97,68	100,00	4,68	61,71	Baik
31	159109	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	87,97	94,94	95,29	100,00	5,06	62,64	Baik
32	229061	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	87,95	96,17	99,38	100,00	3,83	59,57	Baik
33	209109	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI	87,79	99,68	79,08	100,00	8,29	70,72	Baik
34	229101	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	87,78	96,55	99,71	100,00	3,45	58,63	Baik
35	239128	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	87,29	96,71	97,56	100,00	3,29	58,22	Baik
36	567521	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	86,83	93,92	85,56	100,00	6,08	65,19	Baik
37	129072	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	86,72	98,26	99,69	100,00	1,74	54,35	Baik
38	269111	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	86,68	93,43	89,68	98,94	5,54	63,84	Baik
39	199572	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU	86,21	99,99	94,90	100,00	2,01	55,02	Baik
40	91328	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	86,19	99,13	99,74	100,00	0,87	52,17	Baik
41	309165	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	86,16	98,57	97,69	100,00	1,43	53,57	Baik
42	340999	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	86,09	98,60	97,40	100,00	1,40	53,49	Baik
43	109120	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	85,83	99,29	98,31	100,00	0,71	51,76	Baik
44	199078	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	85,82	99,81	99,98	100,00	0,19	50,48	Baik
45	129114	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG	85,75	99,10	97,18	100,00	0,90	52,26	Baik
46	109071	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	85,73	99,70	99,14	100,00	0,30	50,74	Baik
47	239072	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	85,73	99,85	99,66	100,00	0,15	50,37	Baik
48	199411	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WAJO	85,72	99,96	100,00	100,00	0,04	50,10	Baik
49	319057	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	85,67	99,98	99,76	100,00	0,02	50,04	Baik
50	39153	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	85,63	99,06	96,41	100,00	0,94	52,35	Baik
51	319090	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	85,58	99,97	99,23	100,00	0,03	50,08	Baik

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
52	39098	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	85,56	97,09	89,38	100,00	2,91	57,27	Baik
53	59180	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	85,51	98,94	95,34	100,00	1,06	52,65	Baik
54	60100	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	85,46	99,97	98,55	100,00	0,03	50,08	Baik
55	269065	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	85,35	99,52	96,42	100,00	0,48	51,20	Baik
56	59114	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	85,29	99,70	96,71	100,00	0,30	50,76	Baik
57	249160	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	85,26	99,91	97,25	100,00	0,09	50,23	Baik
58	567338	BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) SURABAYA	85,12	96,52	97,68	100,00	0,25	50,62	Baik
59	89132	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	84,46	94,70	75,21	100,00	5,30	63,24	Baik
60	309033	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,31	98,31	86,61	100,00	1,69	54,22	Baik
61	209008	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI	84,20	99,67	92,77	99,70	-0,04	49,91	Baik
62	341001	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT	84,19	98,66	87,16	100,00	1,34	53,34	Baik
63	169114	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	84,07	98,03	84,36	100,00	1,97	54,92	Baik
64	169066	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	83,81	99,58	88,22	100,00	0,42	51,04	Baik
65	99270	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	83,58	99,59	86,98	100,00	0,41	51,02	Baik
66	60102	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	83,33	99,76	86,19	100,00	0,24	50,59	Baik
67	99316	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	83,30	96,54	75,09	100,00	3,46	58,64	Baik
68	119132	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	83,27	98,32	79,85	100,00	1,96	54,90	Baik
69	49058	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I.	83,25	99,82	85,93	100,00	0,18	50,45	Baik
70	21215	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG	83,21	95,77	71,95	100,00	4,23	60,57	Baik
71	179105	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	83,14	99,35	68,97	100,00	4,41	61,02	Baik
72	89083	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	82,17	99,03	77,28	100,00	0,97	52,43	Baik
73	29161	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	82,08	97,00	48,41	100,00	8,48	71,20	Baik
74	49089	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROV. D.I.	81,81	99,36	76,44	100,00	0,64	51,61	Baik
75	119081	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	81,66	98,63	73,19	100,00	1,37	53,41	Baik
76	219001	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	80,18	100,00	69,65	100,00	0,00	50,00	Baik
77	179062	DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	78,17	99,68	57,58	100,00	0,32	50,79	Cukup
78	79126	DINAS PERKEBUNAN PROV. SUMATERA UTARA	76,76	95,03	48,35	100,00	1,32	53,30	Cukup
79	219092	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	71,62	96,20	47,44	100,00	-5,80	35,51	Cukup

Lampiran 9



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KAMPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**SURAT PERSETUJUAN
HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Nomor: 6058 /OT.240/E.1/04/2022**

Memperhatikan hasil reviu atas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan ini saya menyetujui hasil penilaian mandiri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Reviu Hasil PMPRB Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 April 2022

a.n. Direktur Jenderal Perkebunan
Sekretaris



Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc.
NIP. 197204121999031004



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

BERITA ACARA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Nomor: 5875 /OT.240/E.1/04/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 22 bulan April tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi (POKJA RB) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Tim Assessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022, telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa proses PMPRB telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Bahwa hasil PMPRB unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE-RB), yang ditandatangani bersama Tim POKJA RB unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Tim Assessor Inspektorat Jenderal.

Berita Acara PMPRB ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim POKJA RB Ditjen Perkebunan

1. Sukim Supandi, .Sos,MM
2. Yanuar Arianto, S.TP, MM
3. Hadi Dafenta, SH, M.Sc
4. Gento Widayanto, S.Sos,MM
5. Eva Lizarmi, SP
6. Romauli Siagian, SP, M.Sc
7. Agnes V. Silalahi, SP,M.Sc
8. Dhani Gartina, S.Kom,MT
9. Muh. Salman Ahyar S.Si

Tim Assessor Inspektorat Jenderal

1. Ir. Dahono, M.Si
2. Siti Rohani, SP, MM
3. Hasan Subkhie, S.Pt, MP
4. Herlina Dwi Astuti, SH, MH
5. Nurullah, ST
6. Firmansyah, SP, MM
7. Drajat Jantika, SP
8. Nurul Hasanah, SP
9. M. Ikhsan Nugroho S, S.Si
10. Murni Anggraeni, SE,M.Si

(Berita acara ini dilampiri dengan LKE PMPRB, Absensi, dan dokumentasi/foto)



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

Kementerian Pertanian Gedung C

Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta 12550
Telp. (021) 7815380-4 Fax. (021) 7815486-7815586
<http://ditjenbun.pertanian.co.id>



Direktorat Jenderal Perkebunan